

**POLA REKRUTMEN POLITISI MUDA DI DPD PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA (PKS) KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada Program Studi Politik Islam**

OLEH:

Regita Pramesti Putri

NIM : 1810404017

**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

1443 H/2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing skripsi :

1. Dr. Andi Candra Jaya, M. Hum
NIP. 197201192007011011
2. Ryllian Chandra Eka Viana, MA
NIP. 198604052019031011

Dengan ini menyetujui bahwa skripsi yang berjudul **“POLA REKRUTMEN POLITISI MUDA DI DPD PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur”** yang ditulis oleh :

Nama : Regita Pramesti Putri
NIM : 1810404017
Progra Studi : Politik Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqosyah.

Palembang,
Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Andi Candra Jaya, M. Hum
NIP. 198604052019031011

Ryllian Chandra Eka Viana, MA
NIP. 197201192007011011

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Regita Pramesti Putri
Tanggal & Tanggal Lahir : OKU Timur, 10 Februari 2000
NIM : 1810404017
Program Studi : Politik Islam
Judul Skripsi : Pola Rekrutmen Politisi Muda di DPD Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamat, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan benar belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 2022
Yang Membuat Pernyataan,

Regita Pramesti Putri
NIM. 1810404017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Pelajarilah Adab Sebelum Mempelajari Suatu Ilmu”

Persembahan:

Dengan penuh suka cita dan rasa syukur skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- **Ayah, Ibu dan Adik-adik ku tercinta**
- **Seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat**
- **Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang**

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Pola Rekrutmen Politisi Muda di DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) OKU Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola rekrutmen yang dilakukan oleh DPD PKS OKU Timur dan bagaimana strategi yang digunakan DPD PKS OKU Timur saat melakukan rekrutmen terhadap pemuda. Permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu terkait masalah kesulitan untuk mencari caleg muda karena keberanian mereka untuk mencalonkan diri masih minim dan banyak faktor penghambat lainnya.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metodologi Kualitatif melalui analisis Deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori partai politik dan rekrutmen politik. Data yang dipakai penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, data primer melalui wawancara langsung kepada informan, sedangkan data sekunder berupa arsip kantor DPD PKS OKU Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah dalam melakukan rekrutmen anggota baru PKS menggunakan dua cara. Yakni, pertama pola rekrutmen *fardhiyyah* (individual), PKS membentuk unit pembinaan dan pengkaderan anggota atau yang dikenal dengan *liqo*. Kedua, pola rekrutmen *jama'i* (institusional), melalui beberapa organisasi sayap atau *underbow* PKS melakukan rekrutmen. Organisasi sayap ini menjadi mesin partai dalam rekrutmen terhadap anak muda di Kabupaten OKU Timur.

Strategi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Melakukan Rekrutmen Calon Anggota Parpol Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menggunakan berbagai macam strategi mulai dari pencarian kader oleh Divisi Kepemudaan dan Kaderisasi, melalui kegiatan menarik seperti bakti sosial, seminar kepartaian dan pendaftaran secara online melalui website DPD PKS OKU Timur.

Kata Kunci: Partai Keadilan Sejahtera, Anak Muda, Pola Rekrutmen, strategi, Kader.

ABSTRACT

This thesis discusses the Recruitment Pattern of Young Politicians in the DPD of the Prosperous Justice Party (PKS) OKU Timur. This study aims to find out how the recruitment pattern carried out by dpd PKS OKU Timur and how the strategy used by DPD PKS OKU Timur when recruiting youth. The main problem in this study is related to the problem of difficulty in finding young people because their courage to run for office is still minimal and many other inhibiting factors.

The research method used in this thesis is Qualitative metedology through Descriptive analysis. This research uses political party theory and political recruitment. The data used in this study are primary data and secondary data, primary data through direct interviews with informants, while secondary data is in the form of archives of the DPD PKS OKU Timur office. Data collection is carried out through interviews and documentation.

The results obtained in this study were in recruiting new members of the PKS using two ways. Namely, first the fardhiyyah (individual) recruitment pattern, PKS forms a unit of coaching and sensing members or known as liqo. Second, the pattern of recruitment of jama'i (institutional), through several wing organizations or underbows of the MCC conducts recruitment. This wing organization became a party machine in the recruitment of young people in East OKU District.

The Strategy of the Prosperous Justice Party in Recruiting Candidates for Political Parties In Terms of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2011 concerning Political Parties uses a variety of strategies ranging from the search for cadres by the Youth and Regeneration Division, through interesting activities such as social services, party seminars and online registration through the DPD PKS OKU Timur website.

Keywords: *Prosperous Justice Party, Young People, Recruitment Patterns, strategy, Cadre.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	x
KATA PENGANTAR.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teori	14
1. Partai Politik	15
2. Politisi Muda	16
3. Rekrutmen Politik	17
G. Metodologi Penelitian	20
1. Pendekatan/Metode Penelitian	20
2. Data dan Sumber Data	21
a. Data Primer	21

b. Data Skunder	21
3. Teknik Pengumpulan Data.....	21
a. Wawancara	22
b. Dokumnetasi	23
c. Reduksi Data	23
4. Lokasi Penelitian/Objek Penelitian	24
5. Teknik Analisis Data	24
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II	26
PARTAI POLITIK, POLITISI MUDA DAN REKRUTMEN POLITIK	26
A. Partai Politik.....	26
1. Pengertian Partai Politik	26
2. Fungsi Partai Politik	29
3. Sistem Kepartaian.....	33
4. Klasifikasi Partai Politik	37
B. Politisi Muda.....	38
C. Rekrutmen Politik	39
1. Pengertian Dan Pola Rekrutmen Politik	39
2. Sistem Rekrutmen Politik	42
3. Pola Rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	43
BAB III	45
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN	
PROFIL PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Sejarah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	45
2. Kondisi Politik di OKU Timur	47
3. Kondisi Kepartaian di OKU Timur	48
B. Profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	49
1. Sejarah Singkat Partai Keadilan (PKS)	49
2. Deskripsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	51

1) Struktur Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD OKU Timur	52
2) Kegiatan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) OKU Timur	53
3) Sekretariat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD OKU Timur.....	53
3. Organisasi Sayap (<i>underbow</i>) Partai Keadilan Sejahtera	53
4. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera	54
5. Struktur Organisasi Partai Keadilan Sejahtera Skala Nasional	55
6. Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	55
7. Lambang Partai Keadilan Sejahtera.....	58
BAB IV	61
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Pola Rekrutmen Politisi Muda DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) OKU Timur	61
B. Strategi Yang Dilakukan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) OKU Timur	71
BAB V	75
PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 <i>Perbedaan Pola Rekrutmen Caleg PKS dan PDI-P</i>	2
Tabel 1. 2 <i>Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Pada Pemilu Tahun 2019</i>	5
Tabel 3. 1 <i>Komposisi anggota DPRD OKU Timur dalam dua periode terakhir</i>	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 <i>Lambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</i>	59
--	----

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi sehingga manusia mampu untuk berfikir dan bertindak sesuai sunnahnya. Adapun judul skripsi ini ialah “POLA REKRUTMEN POLITISI MUDA DI DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini begitu banyak kesulitan, hal ini dikarenakan masih kurang banyaknya pengetahuan dan kemampuan yang penulis dapatkan dan penulis miliki, namun berkat hidayah dari Allah SWT dan doa dari berbagai pihak serta bimbingan dari semua pihak yang terlibat skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta Ayahanda Rindi dan Ibunda Yanti yang telah memberikan dukungan moril maupun materil. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan do'a baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku,

2. Prof. Dr Nyanyu Khodijah, S.AG.,M.SI, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang,
3. Ibu Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,
4. Bapak Dr.Ahmad Syukri, S.IP.,M.Si Selaku Ketua Jurusan Politik Islam dan Bapak Kiki Mikail, M.A,. Selaku Sekretaris Jurusan Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,
5. Bapak Dr. Andi Candra Jaya, S.Ag.,M.Hum Selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi,
6. Bapak Ryllian Chandra Eka Viana, MA Selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan membagi pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini,
7. Segenap Dosen Fakultas Adab dan Humaniora yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Adab dan Humaniora dan seluruh Staff Administrasi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Seluruh pengurus Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang telah meluangkan waktu untuk menjadi informan dalam penulisan skripsi ini,
9. Saudara kandung penulis adinda Riska, Adit dan Dhio, terima kasih telah menghibur dan membuat warna dalam kehangatan keluarga. Serta seluruh

keluarga besar yang telah memberikan do'a, dukungan, semangat dan perhatian kepada penulis,

10. Teruntuk teman baik saya Aidil Wahyudi, S.E terima kasih atas dukungan, semangat, do'a serta motivasi. Dan telah menjadi orang yang paling direpotkan saat proses bimbingan dan pembuatan skripsi ini.
11. Seluruh sahabat penulis terima kasih telah memberikan motivasi. Dan Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.
12. And last, terima kasih untuk diriku sendiri Regita Pramesti Putri. Jangan puas hanya sampai disini, terus kejar mimpi-mimpi itu, jangan menyerah! Terus semangat!

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Aamiin, Yaa Rabbal'alam.

Palembang, September 2020
Penulis

Regita Pramesti Putri
NIM. 1810404017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, di Indonesia mulai bermunculan partai dengan ideologi agama terutama partai Islam. Islam melihat kebijakan tentang semua ukuran yang serupa dengan promise kesatuan, dengan ucapan lain Islam tidak akan baik dan sempurna dalam ukuran-ukuran yang mengganggu kesatuan. Karena sebuah partai politik seperti itu hanya menghadirkan partisipasi sebagian daripada masyarakat, maka partai politik cenderung kepada pemilihan masyarakat kedalam berbagai kelompok. Partai Islam yang dimaksud disini adalah partai-partai yang secara eksplisit mengklaim Islam sebagai ideologi mereka dan/atau partai yang memiliki basis dukungan dari organisasi-organisasi atau kelompok Islam. Partai Islam yang secara tegas mencantumkan Islam sebagai azas partai ada tiga yaitu PBB (Partai Bulan Bintang), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) (Azri, 2019, p. 179).

Hal yang menarik untuk kemudian diteliti ialah PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang sistematis dan metodik. Kaderisasi ini memiliki fungsi rekrutmen calon anggota dan fungsi pembinaan untuk seluruh anggota, kader, dan fungsionaris partai. Fungsi-fungsi ini dijalankan secara terbuka melalui infrastruktur kelembagaan partai yang tersebar dari tingkat pusat hingga tingkat ranting. Fungsionalisasi

berjalan sepanjang waktu selaras dengan tujuan dan sasaran umum partai, khususnya dalam bidang penyiapan sumber daya manusia dalam partai (Azri, 2019).

Ada kecenderungan yang hampir mirip yang ditunjukkan oleh partai politik dalam melakukan kegiatan rekrutmen politik antara partai satu dengan yang lainnya. Banyak anggapan bahwa partai-partai politik saat ini dicitrakan hanya sebagai penyedia jasa politik bagi aktor politik yang hendak menjadi pejabat publik, terlebih lagi munculnya fenomena kutu loncat atau mudahnya seseorang berpindah partai hanya untuk memperoleh dukungan politik dan kedudukan tertentu dalam sebuah pemerintahan menjadi masalah baru yang dialami hampir sebagian besar partai politik.

Pola rekrutmen anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki perbedaan dengan partai islam lainnya, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa.

Tabel 1. 1

Perbedaan Pola Rekrutmen Caleg PKS dan PDI-P

No	Aspek	PKS	PKB
1	Sumber Bacaleg	Hanya merekrut bacaleg kader, perekrutan bacaleg non-kader sangat jarang dilakukan.	Merekrut bacaleg baik kader maupun non-kader.
2	Rekrutmen tertutup	Dilakukan dengan penunjukan penawaran pada kader partai secara langsung.	Tidak melakukan rekrutmen tertutup.

3	Rekrutmen terbuka	Semua masyarakat berkesempatan untuk dapat menjadi caleg PKS, akan tetapi harus mengikuti kaderisasi berjenjang terlebih dahulu.	Semua masyarakat berkesempatan untuk dapat menjadi caleg partai PKB sesuai peraturan yang ada.
4	Waktu pelatihan bacaleg non-kader	Fleksibel, dapat sebelum atau sesudah Bacaleg ditetapkan menjadi caleg namun tetap bersifat wajib.	Harus diikuti sebelum ia ditetapkan menjadi caleg PKB.
5	Seleksi awal	Dengan mewajibkan Bacaleg membuat paper tentang visi misi dengan menurunkan <i>platform</i> partai.	Dengan seleksi Administrasi dan <i>fit and proper test</i> .
6	Media sosialisai kepada masyarakat	Menggunakan pamflet yang di tempel di kantor DPD PKS.	Menggunakan media massa cetak maupun elektronik..

Sumber: Mussolli, 2016

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK) adalah sebuah partai politik berbasis Islam yang memiliki perwakilan di parlemen Indonesia. Partai ini berdiri pada 20 April 1998 yang berawal dari gerakan aktivitas dakwah Islam sejak 1980-an. kelahiran PKS erat kaitannya

dengan gerakan Islam berbasis massa kampus dan cendekiawan yang muncul sebagai tanggapan atas tekanan politik pemerintah orde baru terhadap umat islam.

Dengan latar belakang pendirinya yang sebagian besar adalah anak muda terdidik, PKS meraup dukungan paling banyak di perkotaan. PKS menempatkan tokoh tokoh muda sebagai kandidat alternatif untuk diusung sebagai gubernur, bupati, dan wali kota melalui pemilihan kepala daerah secara langsung yang digelar sejak 2005. PKS juga memiliki jenjang dalam pengkaderan yaitu anggota pemula, anggota muda, anggota madya, anggota dewasa, anggota ahli dan anggota purna (Andani, 2019, p. 429)

Peluang munculnya politisi muda sangat terbuka lebar. Dari UU yang ada untuk kepala daerah minimal 25 tahun, gubernur 30 tahun bahkan syarat capres hanya 35 tahun dan anggota DPR DPRD 21 tahun. Namun demikian, di tengah banyaknya peluang juga banyak tantangan untuk mewujudkan politisi muda yang mampu mendorong politik yang beradab. Salah satu tantangan terberatnya adalah orang Indonesia cenderung tidak suka berpolitik. Sangat diiharapkan kedepannya politisi muda dapat terus membawa isu-isu moderat dibanding isu politik identitas agar bisa terciptanya politik yang beradab. Keterlibatan politisi muda di dunia politik itu sangat penting. Namun menariknya adalah ketika politisi muda diberikan peluang untuk terjun ke dunia politik terkadang malah minim dukungan dari masyarakat (Sukoyo, 2019).

Pemuda dalam PKS disebut PKS muda, PKS muda di bawah naungan Partai Keadilan Sejahtera dan dibawah bimbingan bidang kepemudaan dan merupakan program yang dibuat PKS untuk kaum muda. PKS muda adalah gerakan yang digagas untuk memaksimalkan segala sumberdaya yang ada untuk menggalang serta membina pemuda. Selain itu PKS muda menegaskan citra PKS sebagai partainya anak muda. Partai yang nyaman buat anak muda mengembangkan bakat serta mengekspresikan diri. PKS akan selalu memberikan perhatian terhadap pendidikan politik untuk kalangan muda (<https://pksmuda.id/>).

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) OKU Timur menetapkan 454 Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten OKU Timur dari 5 Dapil periode 2019 s/d 2024 dalam pemilu tahun 2019. Berikut Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Partai Keadilan Sejahtera :

Tabel 1. 2

Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Pada Pemilu Tahun 2019

Nomor Urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)
Dapil 1		
1	Apri Santoso, A.Md	L
2	Muhamad Zen	L
3	Elida Wati	P

4	Agus Nugroho, SE	L
5	Safe'i	L
6	Susi Handayani, S.Pd	P
7	Andriyani	P
8	Ir. H. Ansori Madenan	L
Dapil 2		
1	Drs. Sholihin Syam	L
2	Agus Alatas, SE.MM	L
3	Sivit Wahyu Ningsing, S.Pd	P
4	Andrie Zuliansyah, SP	L
5	Meliza Purnama Sari	P
6	Jazim Rifai, S.Pd.I	L
7	Lisa Dwi Cahyani	P
8	Suhud Amirul Hadi, A.Md	L
Dapil 3		
1	Rafelta Tuska Putra, S.Pt	L
2	Sokheh Amir, S.Si	L
3	Miftahul Khotimah, S.Pd.I	P

4	Muhammad Yunus, S.Pd.I	L
5	Fitri Handayani, Amd	P
6	Nur Sidik Meilani, S.Pd	L
7	Darmadi	L
8	Titik Purwati	P
Dapil 4		
1	Drs. Markum	L
2	Beni Saputra, S.Si	L
3	Linda Fitriyani, SH	P
4	Irpan Hanar, S.Pd.I	L
5	Suryani	P
6	Angga Kurniawan	L
7	Putri Novia Sari, S.Pd	P
Dapil 5		
1	M. Johan, S.Pd	L
2	Ikhwanudin	L
3	Yeni Rusmila Dewi, S.Pd	P
4	Purwanto	L
5	Adrina Bahari	P
6	Sukirno	L

Sumber: (www.okutimurkab.go.id)

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai PKB, Partai Gerindra dan Partai Golkar di Kabupaten OKU Timur mendapat perolehan kursi terbanyak di Pemilihan Legislatif 2019. Ketiga partai tersebut sama-sama memperoleh 6 kursi DPRD Kabupaten. Sedangkan, Partai Nasdem serta Demokrat meraih 5 kursi, dan partai lain rata-rata dibawah 4 kursi (termasuk PKS). Untuk peraih suara perseorangan terbanyak diperoleh dari Partai Gerindra Dapil 5 dengan perolehan suara 8,321 (kab-okutimur.kpu.go.id).

Pada pemilihan umum tahun 2019 Di OKU Timur jumlah yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terdapat 37 orang, dan dari 37 orang tersebut ada 5 orang yang umurnya dibawah 35 tahun. DPRD OKU Timur menyediakan 3 kursi untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan dari 37 calon anggota legislatif tadi terpilihlah 3 orang. Diantara 3 orang yang terpilih itu hanya 1 orang yang umurnya dibawah 35 tahun, dari sini bisa dilihat bahwa calon anggota legislatif yang berusia muda belum bisa meyakinkan pemilih atau masih minim dukungan (www.okutimurkab.go.id, 2019).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ketika saat proses perekrutan bakal caleg muda, tidak sepenuhnya caleg yang direkrut diwajibkan dari kader partai itu sendiri. Bahkam juga diperbolehkan caleg yang bukan kader untuk dijadikan bacaleg dari partai, dan tidak menutup kemungkinan bahwa caleg yang non kader lebih unggul dibandingkan dengan caleg dari kader itu sendiri.

Dalam penelitian ini penulis sangat tertarik dengan pola rekrutmen politisi muda yang dilakukan oleh PKS di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) guna menjadikannya bagian strategis bagi pengembangan partai ke depan. Penulis juga ingin mengetahui peran politisi muda itu sendiri dalam menghadapi perpolitikan di Kabupaten OKU Timur. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui secara mendalam mekanisme rekrutmen politisi muda yang dilakukan oleh PKS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah yang muncul adalah:

1. Bagaimana pola rekrutmen politisi muda di DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten OKU Timur?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) OKU Timur dalam rekrutmen politisi muda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini di antaranya adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pola rekrutmen yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap politisi muda di DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten OKU Timur.

2. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan PKS OKU Timur dalam merekrut para politisi muda.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pemahaman tentang partai politik, terutama dalam rekrutmen yang baik dengan permasalahan yang ada di dalamnya melalui mekanisme rekrutmen yang dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup terdapat pada setiap partai politik di Indonesia dalam menetapkan Caleg.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan peninjauan terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan rekrutmen partai politik sebagai bahan pembandingan dan pelengkap. Adapun penelitian yang peneliti jadikan sebagai bahan telaah pustaka dan bahan pembandingan, sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang ditulis Amaliya Hidayatul Fajrina, tentang *Strategi Rekrutmen Partai Gerindra Dalam Kaderisasi Pemuda di Kota Surabaya*. Penelitian Amaliya dilatar belakangi Partai Gerindra merupakan partai baru namun cukup diperhitungkan dalam kancah perpolitikan Indonesia. Menurut Amaliyah, dengan system perekrutan yang cenderung terbuka, Partai Gerindra mampu melebarkan sayap dan memberikan kesempatan secara luas bagi generasi muda Indonesia, khususnya generasi muda di kota Surabaya untuk ikut bergabung menjadi bagian di dalamnya. Penelitian dengan menggunakan teori rekrutmen politik menurut Michael Rush dan Philip Althoff menyimpulkan bahwa Partai Gerindra menggunakan system terbuka,

di mana semua pemuda dari golongan manapun secara luas dan terbuka dapat ikut bergabung tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, partai Gerindra Surabaya juga ditemukan menggunakan system Patronase (patronage system). Disamping itu, partai Gerindra memiliki faktor pendukung serta faktor penghambat dalam melakukan rekrutmen (Fajrina).

Kedua, penelitian Ilham Anshari, Dina Fadiah (2019) dari jurnalnya yang berjudul *Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus: Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kota Bekasi Dalam Menetapkan Calon Anggota Legislatif DPR RI tahun 2014-2019)*. Penelitian ini mengkaji persoalan pola rekrutmen politik yang diterapkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan menghasilkan pemahaman mengenai secret garden partai, dalam proses pemilihan calon anggota legislatif (caleg) pada pemilu legislatif (pileg) DPR RI tahun 2014. Pola yang diterapkan berdasar kepada hal yang tercantum dalam AD/ART partai Bab Visi dan Misi Partai Amanat Nasional dengan sub bab D mengenai garis perjuangan partai poin pertama mengenai politik dan hukum, PAN dengan pasti mengedepankan prinsip pemberian hak otonom kepada daerah dengan maksud untuk memberikan kebebasan kepada daerah, untuk dapat menggali lebih jauh potensi yang ada di daerah tersebut. Penelitian ini memfokuskan lokasi kajian pada DPC PAN Mustika Jaya Kota Bekasi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan format penelitian studi kasus. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka serta dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah adanya perbedaan pola rekrutmen yang digunakan oleh PAN dengan partai

politik lain, yang masih sangat bergantung kepada keputusan pimpinan pusat. Dalam proses penetapan calon, DPP hanya sebagai dewan pertimbangan sementara itu yang memiliki peranan besar adalah pimpinan partai tingkat daerah, seperti DPW, DPD, DPC dan ranting. PAN memiliki dua cara dalam memilih calon kader yang akan maju dalam proses pemilihan, yaitu memilih calon yang sudah dikenal oleh masyarakat dan putra daerah (Anshari Fadiyah, 2019).

ketiga, Febriani (2010) skripsi dengan judul *Pola Rekrutmen Caleg Perempuan oleh partai politik pada pemilu legislatif periode 2009-2014 di Kabupaten Pesisir Selatan*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pola rekrutmen Perempuan oleh Partai politik pada pemilu legislatif periode 2009-2014 kabupaten Pesisir Selatan belum terlaksana dengan baik, partai merekrut perempuan hanya untuk memenuhi kuota 30% perempuan. Dalam merekrut perempuan tidak terdapat signifikansi peraturan, partai lebih mengutamakan sistem klik. Pengambilan keputusan rekrutmen dipegang oleh petinggi partai serta hanya diketahui oleh segelintir yang ada di dalamnya. Dan ini sangat jelas bahwa bentuk seleksi yang dilaksanakan oleh partai politik tanpa pengaturan ketentuan dan prosedur yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen belum terlaksana secara demokrasi dan teori Alan Ware yang dipergunakan di dalam penelitian ini tidak terlaksana pada proses rekrutmen politik terhadap perempuan saat pemilu legislatif periode 2009-2014 kabupaten Pesisir Selatan. Jadi yang membedakan dengan penelitian peneliti adalah objek kajian yang mana peneliti lebih memfokuskan pada satu partai

dengan melihat pola rekrutmennya, sedangkan Febriani lebih melihat kuota caleg perempuan di parlemen (Febriani, 2010).

Keempat, penelitian yang ditulis Parastri Indah Permatasari tentang *Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Muda Studi Kasus: Penetapan Kuota 30% Caleg Muda Partai Golkar Di Kota Surabaya*. Penelitian Parastri dilatarbelakangi melihat adanya penetapan kuota 30% yang diberikan Partai Golkar dalam Rapimnas IV yang lalu untuk memberikan kesempatan pada kader-kader muda Partai Golkar agar dapat masuk dalam daftar Calon Anggota Legislatif pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang. Sebagai bentuk dari proses regenerasi partai, kuota tersebut dianggap sebagai awal untuk membentuk kader-kader baru yang berkualitas. Dengan demikian, partai politik juga ikut memperluas partisipasi politik, dengan mengajak golongan muda untuk menjadi kader yang dimasa mendatang akan menggantikan pimpinannya yang lama.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Partai Golkar melakukan proses rekrutmen melalui dua pola. Pertama, merekrut kader-kader muda melalui organisasi-organisasi pendukungnya. Kedua, melakukan proses penjaringan yang dilakukan oleh tim seleksi untuk menyeleksi Bacaleg muda yang akan masuk dalam daftar Caleg DPRD Kota Surabaya dari Partai Golkar. Selain itu, hasil rekrutmen tersebut menunjukkan bahwa banyak dari Caleg muda di DPD Partai Golkar Kota Surabaya masih direkrut secara informal daripada secara formal sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti adanya hubungan kekeluargaan, kedekatan dengan tokoh, ataupun hanya sebagai pemenuhan

kuota kosong. Kemudian, untuk implementasi kuota 30% caleg muda Golkar di Kota Surabaya sendiri, masih belum sepenuhnya dapat terealisasi. Terbukti dari 5 dapil di Kota Surabaya, hanya 1 dapil yang telah mencapai kuota tersebut (Permatasari).

Keempat penelitian sebelumnya yang membahas rekrutmen partai politik serta permasalahan tersebut menjadi rujukan yang digunakan oleh peneliti. Beberapa penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai tema yang diteliti, sama-sama meneliti tentang rekrutmen partai politik. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai partai politik yang dipilih dan lokasi yang diteliti. Penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada pola rekrutmen politisi muda di DPD PKS Kabupaten OKU Timur.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah alur atau logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposi yang disusun secara sistematis. Untuk menganalisa penelitian ini teori yang digunakan adalah teori partai politik dan rekrutmen politik. Beberapa teori ini digunakan sebagai bahan dasar penguat argumentasi dan menganalisis lebih jauh mengenai rekrutmen partai politik untuk melihat bagaimana pola rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera DPD OKU Timur.

1. Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasa terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya kemanfaatan yang bersifat ideil serta materiil.

Sigmund Neumann dalam buku karyanya, *Modern Political Parties* mengemukakan definisi partai politik. Menurutnya partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Mariam Boediardjo (2008) mengemukakan bahwa fungsi partai politik pada Negara yang demokratis, salah satunya adalah melakukan rekrutmen politik. Secara lengkap dia menyatakan bahwa partai politik sebagai sarana rekrutmen politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota politik. Dengan demikian partai dapat memperluas partisipasi politik dengan cara melalui kontak pribadi, persuasi, dan lain lain. Serta diusahakan untuk dididik menjadi kader yang dimasa mendatang akan menggantikan pimpinan lama.

Dalam melaksanakan fungsi kontrol politik, partai politik juga harus menggunakan tolak ukur tersebut sebab pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan bersama sehingga seharusnya menjadi pegangan bersama.

2. Politisi Muda

Politisi muda merupakan generasi milenial memiliki peluang besar untuk memimpin masa demokrasi indonesia, politisi muda adalah masa depan partai politik. Banyak partai politik yang melibatkan anak muda, akan tetapi proses menempatkan anak muda dalam partai politik tentu tidak semudah membalik telapak tangan sebab bukan hanya mengandalkan strategi atau hanya mencari sebuah momentum semata (Kompas, 2022).

Saat ini tidak sedikit anak muda yang menjadi politisi dengan harapan mendapat dukungan dari kaum mayoritas oemilih tersebut. Para politisi muda dianggap membawa ide dan inovasi terbaru sehingga

mampu mengalahkan perusahaan-perusahaan tradisional mapan yang lamban dalam menyesuaikan diri. Kehadiran politisi-politisi muda harus benar-benar didasarkan pada kemampuan dan kinerja untuk memberi solusi atas berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat (analisadaily, 2022).

3. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu Negara, karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik Negara itu melalui lembaga-lembaga politik yang ada. Dalam hal ini, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik sangat bergantung pada kualitas rekrutmen politik. Kualitas ini dapat dilihat dari apakah proses ini dapat menghasilkan orang-orang yang berkualitas atau tidak dan mendudukkannya pada jabatan sesuai atau tidak, ini semua sangat bergantung pada pola-pola atau mekanisme rekrutmen yang digunakan (Sahid, 2011, p. 57).

Philip Althoff dan Michael Rush (1990) menekankan studi perekrutan politik pada peranan sistem pengadaan atau pengisian jabatan politik dalam proses rekrutmen tersebut. Secara lebih jelas Ramlan Surbakti memberi pengertian bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen merupakan

kelanjutan dari fungsi mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.

Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya. Namun, rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa politik seperti yang terdapat dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik yang menyebutkan bahwa rekrutmen adalah proses mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (Budiarjo, 2008, p. 16).

Pola merupakan corak, model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur yang tetap dan rencana). Pola rekrutmen adalah konstansi berbagai praktek rekrutmen oleh partai politik. Pada dasarnya setiap partai harus berprinsip untuk terbuka bagi kelompok sosial manapun, namun pada level praktis seringkali sulit dihindari bahwa tiap kecenderungan tipe partai menstukturkan perbedaan dalam menatap konsep rekrutmen yang dianggap ideal bagi partainya (Sahid, 2011, p. 141).

Philip Althoff dan Michael Rush (1990) menyebutkan beberapa sistem rekrutmen politik. diantaranya seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan, seleksi melalui penyortiran, seleksi melalui rotasi atau giliran, seleksi melalui perebutan kekuasaan, seleksi dengan cara patronage, seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah dan seleksi melalui koopsi. Adapun mekanisme rekrutmen politik partai yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff adalah proses perekrutan politik

memiliki dua sifat yaitu pertama sifat tertutup adalah suatu sistem perekrutan administratif yang didasarkan atas patronase dan yang kedua sifat terbuka adalah sistem yang berdasarkan pada ujian-ujian terbuka.

Menurut Norris dan Lovenduski (2017), pola rekrutmen terbentuk atas hubungan antara ketersediaan kandidat yang mencari karir politik dan proses seleksi yang ditetapkan oleh partai politik. Terdapat dua pola rekrutmen partai politik. *Pertama*, pola vertikal, yakni rekrutmen partai dilakukan secara hirarki dengan jalur struktural dalam organisasi partai. Dengan pola ini, organisasi partai memiliki kekuasaan dalam menentukan siapa kandidat yang tepat untuk mengisi jabatan politik. Proses rekrutmen didasarkan pada keahlian, kemampuan dan prestasi. Jenjang karir politik ditentukan atas dasar prestasi atau kinerja kader. *Kedua*, pola lateral yakni rekrutmen dibuka kepada semua individu, baik di dalam partai maupun diluar partai. Kader baru dapat masuk menjadi kandidat untuk menentang para petahanan atau kader-kader senior yang telah lama berkecimpung di partai. Pola ini menekankan pada bekerjanya sistem organisasi partai secara demokratis, yang salah satunya dicirikan oleh kekuasaan yang terdesentralisasi. Proses rekrutmen dilakukan secara terdesentralisasi mulai dari pemilihan kandidat potensial di kepengurusan partai tingkat lokal yang terendah, hingga tingkat yang tertinggi.

Pola rekrutmen politik secara umum dibagi menjadi beberapa kategori, yakni rekrutmen anggota dan relawan, pengurus, staf, dan calon

pejabat publik (termasuk calon anggota legislatif (caleg), calon kepala daerah, dan calon presiden-wakil presiden). Semua partai politik pada dasarnya tidak ada yang membatasi keanggotaannya, rekrutmen bersifat terbuka. Dalam hal ini pemilih dalam pemilu yang menentukan partai mana yang paling tepat untuk mereka menjadi anggotanya.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan/Metode Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifikasi dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel (Bungin, 2009).

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan di selidiki. Terkait dengan metode penelitian ini, maka metode penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang pola rekrutmen politisi muda di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten OKU Timur

2. Data dan Sumber Data

Berdasarkan permasalahan diatas maka jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan jenis data sekunder:

a. Data Primer

Data Primer merupakan hasil wawancara, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penulisan ini diperoleh data yang melakukan Wawancara Terhadap Responden yang sesuai dengan responden yang bersangkutan dengan Pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) OKU Timur dan beberapa kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) OKU Timur. Wawancara secara langsung dengan Responden untuk mendapatkan Informasi mengenai Rumusan Masalah yang ada.

b. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang sudah tersedia atau data yang diperoleh dari sumber luar lapangan berupa dokumentasi dan arsip-arsip resmi sehingga peneliti hanya tinggal mencari dan mengumpulkan. Data skunder dalam penelitian ini bersumber pada buku, skripsi, tesis, koran dan beberapa media massa yang berkaitan dengan topik penelitian guna dijadikan sebagai sumber data skunder dan untuk melengkapi data primer.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara narasumber atau orang yang di wawancarai tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. (Sugiono, 2011:135) Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.

Dalam penelitian kualitatif penulis melakukan wawancara terhadap sekretaris umum DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten OKU Timur dan 3 (tiga) kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten OKU Timur yaitu Bapak Ikhwanudin (Sekretaris Umum PKS OKU Timur), Bapak Sokheh Amir (Kader PKS OKU Timur, Bapak Nur Sidik Meilani (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu & Pilkada), dan Bapar Sariyono (Kader PKS). Dari penelitian terhadap informan yang dilakukan penulis dapat memberikan informasi mengenai data yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Dalam wawancara bertahap dan berstruktur ini, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh sehingga dalam hal ini peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan. Berdasarkan tiap jawaban dari informan tersebut maka peneliti dapat

mengajukan pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada Rumusan masalah yang ada. (Sugiono, 2011:135)

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain sebagainya. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil gambar berupa foto, dan merekam hasil wawancara dengan informan terkait dengan video dan audio.

c. Redaksi Data

Redaksi Data adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Merekduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, lalu dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direkduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

4. Lokasi penelitian/Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dengan objek penelitian DPD Partai Keadilan Sejahtera OKU Timur. Alasan pemilihan lokasi karena peneliti telah mengenal situasi, lokasi dan subjek penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Pengolahan data analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif di mana jenis data yang terbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data di kelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah di kelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih di mengerti. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang di lakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.

- 2) Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
- 3) Penyajian data setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah penelitian ini, peneliti menguraikan secara sistematis ke dalam lima bab. Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, akan memaparkan pernyataan masalah dari pertanyaan masalah yang menjadi titik fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterikatan dengan penelitian rekrutmen politik, sistematika penulisan serta metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

Bab II, akan mengkaji lebih dalam mengenai kerangka teori yang penulis jadikan sebagai analisis untuk menjelaskan fenomena yang dijadikan sebagai objek penelitian serta sebagai acuan dalam penulisan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan masalah yang peneliti ajukan. Dalam hal ini teori yang

dijadikan alat analisis oleh peneliti yaitu teori partai politik dan pola rekrutmen politik.

Bab III, Gambaran umum. *Pertama*, membahas tentang gambaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. *Kedua*, membahas tentang latar belakang berdirinya PKS, visi dan misi PKS, deskripsi PKS skala Nasional, lambang PKS. Hal dilakukan agar memahami latar belakang berdirinya partai politik.

Bab IV, memaparkan inti dari penulisan penelitian ini yaitu tentang pola rekrutmen politisi muda DPD PKS OKU Timur. Proses pola rekrutmen yang dilakukan oleh PKS serta strategi PKS OKU Timur dalam melakukan rekrutmen terhadap politisi muda..

Bab V, memaparkan hasil temuan berdasarkan bab sebelumnya untuk kemudian dijadikan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini serta memberikan jabaran rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

PARTAI POLITIK, POLITISI MUDA DAN REKRUTMEN POLITIK

A. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai Politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dimana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama (Budiardjo, 2010, p. 160).

Partai politik adalah bentuk kelompok masyarakat yang didasarkan pada kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai kelompok yang terstruktur awal muncul di sekitar tahun 1830 sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik (Huntington, 2003, p. 472).

Neumaan berpendapat bahwa persaingan partai politik didasarkan pada pandangan-pandangan yang berbeda. Menurut Neumann partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (Budiardjo, 2008, p. 404).

Menurut Miriam Budiardjo definisi partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Syafiie, 2010, p. 326).

Selanjutnya menurut Ramlan Surbakti partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternative kebijakan yang telah mereka susun. Alternative kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemiliha umum dan cara-cara lain yang sah (Surbakti, 2007, pp. 148-149).

Dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 2 tahun 2011 yang mengatur partai politik bersifat nasional, yang dimaksud partai politik dalam UU ini adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Pasal 1 ayat 1 UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik).

Partai politik mempunyai peran sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai politik mempunyai peran sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Karena fungsi partai politik yang ideal menurut Almond dan Coleman adalah berpartisipasi dalam sektor pemerintahan dan turut serta mengambil dan menentukan keputusan politik. Hal ini sesuai dengan proses rekrutmen untuk pengisian jabatan politik pada lembaga-lembaga politik, termasuk jabatan dalam birokrasi atau administrasi negara dan partai-partai politik (Nuhdi, 2007, p. 22).

Gabriel A. Almond dikutip Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, Partai Politik adalah organisasi manusia di mana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*ideal objective*), mempunyai program politik platform, sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa (Mas'ood, 2011, p. 52).

Jadi, partai politik sebagai organisasi harus memenuhi kriteria di atas secara material dan substansial. Tujuan yang mengarah pada penguasaan suatu jabatan publik yang membedakannya dengan kelompok kepentingan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa partai politik bisa

dibedakan berdasarkan basis sosial yang mendukungnya dan tujuan yang ditetapkannya.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan atas beberapa unsur dan elemen dari partai politik. Pertama, partai politik merupakan organisasi yang terlembaga. Kedua, anggota organisasi tersebut mempunyai cita-cita, nilai, tujuan dan pandangan yang sama untuk menjadi kesatuan politik. Ketiga, partai politik menyampaikan kepada masyarakat kepentingan-kepentingan politik, sosial, dan ekonomi serta ideologi dari partainya. Dengan demikian partai politik menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Keempat, partai politik akhirnya bertujuan untuk mempengaruhi dan mengontrol pemerintah atau menguasai pemerintah (Firmanzah, 2008:56-57).

1. Fungsi Partai Politik

Peran dan fungsi partai politik dapat di bedakan menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga melakukan eksternal organisasi, di sini peran dan fungsi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik (Firmanzah, 2008:67).

PKS sebagai salah satu partai berbasis Islam harus melakukan proses rekrutmen politik terhadap masyarakat untuk menjadi anggota atau kader partai. Fungsi ini wajib dijalankan setiap partai politik guna mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Dalam menyelenggarakan demokrasi partai politik menurut Miriam Budiardjo menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut (Budiardjo, 2010:405-409):

a. Sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik mempunyai fungsi salah satunya sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara memerintah dengan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada masyarakat dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan rakyat.

b. Sebagai sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Proses sosialisasi politik berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Proses ini dapat diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai,

norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai sarana sosialisasi politik, seperti sekolah, partai politik, dan pemerintah. Partai politik dalam sistem politik dapat menyelenggarakan proses sosialisasi politik pada masyarakat

c. Sebagai sarana rekrutmen politik

Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.

d. Sebagai sarana pengatur konflik

Potensi konflik akan selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen dengan berbagai macam suku bangsa, sosial-ekonomi, maupun agama. Peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan pada musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Untuk mencapai penyelesaian berupa keputusan itu diperlukan kesediaan

berkompromi diantara para wakil rakyat, yang berasal dari partai-partai politik.

Fungsi partai politik menurut UU No. 31 tentang partai politik adalah sebagai sarana : a) pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, b) menciptakan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan berbangsa untuk mensejahterakan masyarakat, c) penyerapan, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, d) partisipasi politik warga negara Indonesia, e) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2002).

Dengan melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya negara demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai keputusan-keputusan politik yang diambil pemerintah.

Secara singkat partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahannya. Selain itu, partai politik juga melakukan fungsi-fungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik politik, pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.

2. Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian merupakan pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Maurice Duverger dalam bukunya *Political Parties* menggolongkan sistem kepartaian menjadi tiga kategori, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem Multi partai (Budiardjo, 2010, p. 415) :

a. Sistem Partai Tunggal

Sistem partai tunggal ini mengandung dua pengertian, pertama, di dalam suatu negara memang benar-benar terdapat satu buah partai. Kedua, pada negara tersebut terdapat beberapa partai, namun hanya satu partai yang dominan, sementara partai yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Terkait dengan penggunaan istilah sistem partai tunggal, sebagian pengamat berpendapat bahwa penggunaan istilah tersebut tidak tepat karena penggunaan kata sistem pada istilah sistem partai tunggal menunjukkan keadaan

yang menyangkal diri sendiri (*contradictio interminis*) sebab berdasarkan pengertiannya suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian (*ytars*). Walaupun demikian, istilah ini telah terlanjur disebarkan dan dipakai baik untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lain.

Negara yang menerapkan pola partai tunggal terdapat di beberapa negara di Afrika, Kuba, dan Cina. Sedangkan Uni Soviet ketika masih berdiri dan beberapa negara di Eropa Timur juga pernah mempraktikkan pola ini. Suasana kepartaiandinamakan nonkompetitif karena semua partai harus menerima pimpinan dari partai yang dominan, dan tidak dibenarkan bersaing dengannya (Budiardjo, 2010:415).

b. Sistem Dwipartai

Sistem dwipartai biasanya diartikan sebagai dua partai di antara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. Negara-negara yang memakai sistem ini adalah Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Filipina, dan Selandia Baru. Maurice Duverger mengatakan bahwa sistem ini adalah khas Anglo Saxon. Pada sistem dwipartai ini hanya terdapat dua partai politik, yaitu partai yang berkuasa dan partai oposisi.

Dengan demikian, jelaslah letak tanggung jawab mengenai pelaksanaan kebijakan umum.

Sistem dwi partai pernah disebut a convenient system for contented people dan memang kenyataannya ialah bahwa sistem dwipartai dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu komposisi masyarakat bersifat homogeny (*social homogeneity*), adanya konsensus kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial dan politik (*political consensus*), dan adanya kontinuitas sejarah (*historical continuity*) (Labolo, 2015:34).

Di Indonesia pada tahun 1968 ada usaha untuk mengganti sistem multipartai yang telah berjalan lama dengan sistem dwipartai, agar sistem ini dapat membatasi pengaruh partai-partai yang telah lama mendominasi kehidupan politik. Beberapa akses dirasakan menghalangi badan eksekutif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Akan tetapi, eksperimen dwipartai ini, sesudah diperkenalkan di beberapa wilayah, ternyata mendapat tantangan dari partai-partai yang merasa terancam eksistensinya. Akhirnya gerakan ini dihentikan pada tahun 1969 (Budiardjo, 2010:418).

c. Sistem Multipartai

Sistem multipartai dipilih mengingat adanya keanekaragaman budaya politik pada suatu negara. Berbagai macam perbedaan tersebut mendorong golongan-golongan yang

ada dalam masyarakat untuk membentuk partai politik sehingga aspirasi yang mewakili golongan mereka dapat disuarakan oleh wakilnya di parlemen. Sistem multipartai dipraktikkan di negara Indonesia, Malaysia, Belanda, Australia, Swedia, Prancis, dan Federasi Rusia (Budiardjo, 2010, p. 418).

Kelemahan yang tampak pada sistem ini adalah lemahnya peran dari badan eksekutif. Hal ini dikarenakan tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Salah satu kelemahan dari koalisi adalah mengakibatkan tidak efektifnya pemerintahan karena partai yang berkoalisi harus selalu mengadakan musyawarah dan kompromi dengan mitranya dan kalau sampai terjadi ketidakcocokan maka koalisi yang dibangun terancam bubar (Budiardjo, 2010, p. 418).

Di lain pihak, tidak adanya peran partai oposisi yang jelas mengakibatkan kurang terlaksananya mekanisme *check and balance* di pemerintahan. Partai oposisi juga terkadang ragu-ragu untuk menyatakan bahwa dirinya oposisi karena kurang berperannya partai oposisi sebagai partai yang mengontrol kebijakan pemerintah. Akibatnya partai oposisi bisa sewaktu-waktu diajak oleh partai pemerintah untuk membentuk koalisi baru dan duduk di pemerintahan. Ketika hal tersebut terjadi maka letak

tanggung jawab partai politik menjadi tidak jelas (Labolo, 2015, p. 36).

3. Klasifikasi Partai Politik

Klasifikasi partai secara umum dapat dibagi dalam dua jenis yaitu partai massa dan partai kader. Menurut Haryanto, partai politik dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya secara umum dapat dibagi mejadi dua kategori, yaitu (Efriza, 2021, p. 567) :

- a. Partai massa, dengan ciri utamanya adalah jumlah anggota atau pendukung yang banyak. Meskipun demikian, partai jenis ini memiliki program walaupun program tersebut agak kabur dan terlampau umum. Partai jenis ini cenderung menjadi lemah apabila golongan atau kelompok yang tergabung dalam partai tersebut mempunyai keinginan untuk melaksanakan kepentingan kelompoknya. Selanjutnya, jika kepentingan kelompok tersebut tidak terakomodasi, kelompok ini akan mendirikan partai sendiri.
- b. Partai kader, kebalikan dari partai massa, partai kader mengandalkan kader-kadernya untuk loyal. Pendukung partai ini tidak sebanyak partai massa karena memang tidak mementingkan jumlah, partai kader lebih mementingkan disiplin anggotanya dan ketaatan dalam berorganisasi. Doktrin dan ideologi partai harus tetap terjamin kemurniannya. Bagi anggota yang menyeleweng, akan dipecat keanggotaannya.

B. Politisi Muda

Politisi muda adalah para anak muda yang sudah terjun di dunia perpolitikan dan masuk dalam kategori senior partai. Politisi muda bisa berarti kader baru atau berusia muda. Kata politisi muda bisa berpengaruh kepada keterikatan dengan pemuda yang selama ini masih menjadi lahan meraup suara pada setiap kontestan demokrasi (pemilu dan pilkada). Politisi muda seakan menggambarkan diri penuh semangat dalam pengabdian politik bagi kemajuan nusa dan bangsa. Politisi muda adalah harapan para pemuda yang butuh figure sebagai representatif jiwa muda (Habibi, 2016).

Pemuda yang menempuh jalur pengabdian sebagai politisi memiliki nilai lebih. *Pertama*, politisi muda adalah seorang yang berusia muda dan mampu mengemban amanah kerja-kerja teknis terberat dalam menjalankan program-program partai. Semangat politisi muda bagaikan cahaya mentari yang memberikan sinar kehidupan bagi partai. *Kedua*, politisi muda yang memiliki semangat belajar dan terus berkembang untuk mengkaji, meneliti dan memproduksi pemikiran, ide serta pandangan perbaikan partai yang terus menerus dan berkelanjutan. *Ketiga*, politisi muda memiliki waktu yang relatif lebih lama untuk berjuang bersama-sama dengan partai sehingga mampu mengemban misi doktrinisasi ideologi partai kepada masyarakat dan simpatisan (Habibi, 2016).

Para politisi muda yang melenggang ke Senayan dan banyak juga diberbagai daerah, dengan melihat latar belakangnya yang merupakan bagian

dari dinasti politik dan kekuasaan memiliki privilege tersebut. Mereka bagian dari elite politik yang kesehariannya sangat lekat dengan kekuasaan. Mereka mewarisi akses pada kekuasaan, modal sosial dan ekonomi, pengetahuan politik, dan popularitas dari keluarganya (Zaenuri, 2016).

Amalinda Savirani, Ph.D., dosen politik dan pemerintahan di Universitas Gajah Mada Yogyakarta memberikan resep siasat kepada politisi muda dengan melalui empat cara. *Pertama*, tidak ada proses politik yang berjalan dengan instan, sehingga dibutuhkan usaha belajar, latihan setiap saat dan yang utama adalah sabar. *Kedua*, politisi muda sedini mungkin mulai melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat, yakni dengan mengidentifikasi isu-isu strategis sosial sesuai dengan daerah pilihannya masing-masing. *Ketiga*, merumuskan program strategis politik yang memberikan solusi akan kebutuhan pemetaan masyarakat. *Keempat*, kelengkapan individual skills yaitu siasat bagaimana politisi muda untuk membangun sosok citra yang positif dalam masyarakat dengan apa yang ia punya (Setyawan, 2020).

C. Rekrutmen Politik

1. Pengertian dan Pola Rekrutmen Politik

Undang-Undang Partai Politik No. 2 tahun 2011 pada Pasal 29 Ayat (2) Bab XI tentang Rekrutmen Politik yang berbunyi Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

Menurut Ramlan Surbakti pengertian rekrutmen politik adalah untuk seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Partai politik menyeleksi dan menemukannya sebagai seorang calon pemimpin pada suatu masyarakat (Surbakti, 2010:118).

Menurut M. Setiadi, Elly dan Usman Kolip rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok aktor politik untuk menduduki dan menjalankan peranan politik tertentu baik dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan (Setiadi, 2013, p. 282-283).

Menurut Budiardjo (2008) fungsi partai politik setidaknya ada empat macam fungsi yaitu; pertama, sebagai sarana komunikasi politik, artinya partai politik berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (*interest aggregation*) dan sarana perumus kepentingan (*interest articulation*), kedua, sebagai sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra (*image*) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berkaitan dengan pengkaderan dan rekrutmen calon-calon anggota legislatif maupun eksekutif, partai politik harus betul-betul mencari sosok yang benar-benar profesional dan orang-orang yang punya integritas. Keempat, adalah sebagai sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik adalah

masyarakat yang heterogen, tentu selalu berbeda, maka akan berpotensi konflik, maka partai politik dengan simbol partai yang aspiratif dan mampu mengatasinya.

Menurut Erawan, dkk. (2010: 17) Pola merupakan corak, model, system, cara kerja, bentuk (struktur yang tetap dan terencana). Pola rekrutmen adalah konstansi berbagai praktek rekrutmen oleh partai politik. Sungguhpun pada dasarnya setiap partai harus berprinsip untuk terbuka bagi kelompok sosial manapun, namun pada level praktis. Kerap kali sulit dihindari bahwa tiap kali kecenderungan tipe partai menstrukturkan perbedaan dalam menatap konsep rekrutmen yang dianggap ideal bagi partainya.

Adapun mekanisme rekrutmen politik partai yang disampaikan oleh Rush dan Althoff itu dibagi menjadi dua. *Pertama*, rekrutmen terbuka yaitu sistem yang berdasarkan pada ujian terbuka. Cara rekrutmen tersebut sangat kompetitif karena partai politik mampu menilai kemampuan kadernya untuk dapat bersaing di dunia politik dan ini sesuai dengan paham demokrasi yang kita anut. *Kedua*, rekrutmen tertutup, yaitu suatu sistem perekrutan yang didasarkan atas patronase. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang ditampilkan. Cara ini kurang kompetitif jika dilihat dari prosedurnya. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit untuk memperbaharui legitimasinya di partai. Sehingga kader potensial menjadi terhalang untuk menduduki jabatan tertentu (Althoff, 2007:247).

Pola-pola yang terkandung dalam rekrutmen politik memiliki sistem nilai, basis dan stratifikasi sosial yang ada. Rekrutmen politik memiliki sifat khusus di dalamnya, contoh untuk perekrutan tempat-tempat tertentu harus berdasarkan hubungan kedekatan, dalam arti kedekatan seseorang menjadi acuan untuk menempati posisi tersebut.

2. Sistem Rekrutmen Politik

Menurut Miftah Thoha bahwa ada tiga sistem yang sering digunakan dalam proses rekrutmen. *Pertama*, sistem patronik (*patronage system*). Sistem patronik dikenal sebagai sistem kawan, karena dasar pemikirannya dalam proses rekrutmen berdasarkan kawan, ikatan kerabat, dan keluarga. *Kedua*, sistem merit (*merit system*). Sistem ini berdasarkan kecakapan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu sehingga sistem ini lebih bersifat objektif karena atas dasar pertimbangan kemampuan seseorang. Penilaian objektif tersebut pada umumnya menggunakan ijazah pendidikan, sistem seperti ini dikenal dengan “*spoil system*”. *Ketiga* sistem karir (*career system*). Sistem ini sudah lama dikenal dan dipergunakan secara luas untuk menunjukkan pengertian suatu kemajuan seseorang dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi (Tangkilisan, 2003, pp. 189-190).

Pola-pola rekrutmen politik juga merupakan indikator yang penting untuk melihat pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyarakat politik. Pola-pola rekrutmen politik mengungkapkan proses pergeseran ekonomi, infrastruktur politik, serta derajat politisasi dan partisipasi politik

masyarakat. Sistem rekrutmen politik memiliki keseragaman politik yang tiada terbatas, namun pada dasarnya ada dua cara khusus seleksi pemilihan yakni melalui kriteria universal dan kriteria partikularistik.

3. Pola Rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggunakan dua strategi rekrutmen, yaitu: *pertama*, pola rekrutmen individual (*al-da'wah al-fardhiyyah*) atau bentuk pendekatan orang per orang, meliputi komunikasi personal secara langsung. Calon-calon kader yang akan direkrut tersebut akan diajak untuk berpartisipasi dalam serangkaian forum keagamaan dan pelatihan yang diorganisir oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seperti *usrah* (keluarga) atau *halaqah* (kelompok studi terbatas) atau *liqo* (pertemuan mingguan), *rihlah* (rekreasi), *mukhayyam* (perkemahan), *daurah* (pelatihan intelektual), dan *nadwah* (seminar). Harapannya adalah agar setiap peserta baru akan saling mengenal (*ta'aruf*), memahami (*tafahum*), dan mendukung (*tafaul*). Sistem yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mirip dengan sistem kaderisasi gerakan Islamis di Mesir (Nuraini, 2019, p. 161).

Kedua, pola rekrutmen institusional (*al-da'wah jama'i*). Ada berbagai bentuk rekrutmen institusional yang bisa melibatkan struktur formal PKS maupun organisasi-organisasi sayap yang berafiliasi dengan PKS yang bekerjasama dengan institusi-institusi keagamaan seperti masjid maupun institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas. Rekrutmen *jama'i* juga bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti majelis

ta'lim, sekolah ibu, studi intensif, kegiatan Ramadhan, pelatihan, baksos, santunan, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Semua jenis rekrutmen ini berorientasi menjadi pintu masuk bagi calon kader untuk menjadi peserta Tarbiyah level pemula.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PROFIL PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Pada tanggal 19 sampai dengan 21 Juli tahun 2002, DPR RI melalui komisi II beserta Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan Tim Departemen Dalam Negeri melakukan kunjungan, survey dan evaluasi. Di daerah rencana pemekaran, sebagai klimaks perjuangan PPP-KOT (perjuangan panitia persiapan pembentukan kabupaten ogan komering ulu timur) dan seluruh elemen masyarakat membuahkan hasil yaitu dengan terbentuknya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan ditetapkannya UU Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Marleni, 2022, p. 64).

Tanggal 17 Januari 2004 Gubernur Sumatera Selatan melantik Drs. Amri Iskandar, MM sebagai pejabat Bupati Ogan Komering Ulu Timur dan telah meletakkan kerangka awal dari penataan kelembagaan dan dimulai jalannya roda Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dilanjutkan oleh Drs. Sujiadi, MM sebagai pejabat Bupati sampai dengan dilantiknya Bupati Ogan Komering Ulu Timur yang definitif (Marleni, 2022, p. 64).

Dari hasil Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang pertama kali, terpilih H.Herman De7ru,SH dan H.M.Kholid Mawardi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komerling Ulu Timur yang dilantik pada tanggal 23 Agustus 2005 wsebagai Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komerling Ulu Timur. Selanjutnya lahirlah Perda Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur Nomor 39 Tahun 2007 yang menetapkan bahwa tanggal 17 Januari adalah sebagai Hari Jadi Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur. Seiring dengan perjalanan waktu yang ditandai berakhirnya masa jabatan H. Herman Deru dan HM Kholid Mawardi dari jabatannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur pada priode kedua tahun 2010-2015 (Marleni, 2022, p. 65).

Selanjutnya, Pimpinan di Kabupaten OKU Timur dipercayakan Gubernur Sumsel kepada Richard Chahyadi AP, M.Si sebagai Penjabat Bupati OKU Timur sampai dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur hasil Pilkada Tahun 2015. Berdasarkan rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komerling Ulu Timur Tahun 2015 yang di gelar KPU OKU Timur di Martapura tanggal 16 Desember 2015 menempatkan pasangan HM Kholid Mawardi S.Sos M.Si dan Ferry Antoni SE sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur terpilih Priode 2016-2021 dengan perolehan suara sebanyak 180.677 (58,55%) dari total jumlah suara sah 308.587 dengan jumlah pemilih di OKU Timur 330.679 mata pilih. (okutimurkab.go.id, 2012).

Pasangan HM Kholid Mawardi dan Ferry Antoni dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur Priode 2016-2021 oleh Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin pada tanggal 17 Februari 2016 di Palembang, bersamaan dengan pelantikan enam pasangan Bupati dan Wakil Bupati di Sumsel hasil Pilkada tahun 2015. Selanjutnya pada periode 2021-2024 Lanosin Hamzah, S.T terpilih sebagai bupati oku timur dan H.M. Adi Nugraha Purna Yudha, S.H. sebagai wakil bupati terpilih dan dilantik pada tanggal 26 Februari 2021.

2. Kondisi Politik di OKU Timur

Setiap pelaksanaan pesta demokrasi lima tahun, kondisi kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini selalu aman dan lancar karena masyarakat OKU Timur sudah dewasa dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Kondusivitas dan stabilitas keamanan yang tercermin dari keberhasilan penyelenggaraan Pemilu, Pilpres, Pilgub maupun Pilkada di OKU Timur dengan tanpa menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban (Risidiana, 2019, p. 32).

Meskipun dengan jumlah penduduk yang cukup besar yakni sekitar 670 ribu jiwa, masyarakat OKU Timur yang terdiri dari beragam suku dan bahasa selalu hidup rukun dan berdampingan. Pada Pilkada serentak 2020, OKU Timur telah berhasil melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang diikuti oleh dua pasang calon dalam suasana yang sangat kondusif. Kondisi demokrasi terbangun dengan baik, hal ini tercermin dengan tingginya angka partisipasi dalam Pilkada di Kabupaten OKU

Timur yang mencapai angka 80,55% dan tercatat di atas rata-rata angka partisipasi pada Pilkada secara nasional yakni 76,13%. Angka tersebut menunjukkan tingginya tingkat kesadaran dan keinginan masyarakat OKU Timur untuk menggunakan hak politik dalam memilih pemimpin daerahnya (Dinata, 2021).

3. Kondisi Kepartaian di OKU Timur

DPRD OKU Timur memiliki 45 anggota yang tersebar di 11 partai politik dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Golongan Karya. Pemimpin DPRD Kabupaten OKU Timur terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.

Tabel 3. 1

Komposisi anggota DPRD OKU Timur dalam dua periode terakhir

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode	
	2014-2019	2019-2024
PKB	5	6
Gerindra	6	6
PDI-P	6	4
Golkar	8	6
NasDem	5	5
PKS	3	3
Perindo	-	1

PPP	1	2
PAN	2	3
Hanura	4	4
Demokrat	5	5
Jumlah Anggota	45	45
Jumlah Partai	10	11

Sumber: (www.okutimurkab.go.id)

B. Profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

1. Sejarah Singkat Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il. Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945 (PKS, Sejarah Ringkas, 2011).

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) (PEMALANG, 2015).

Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010. Seperti Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid disaat Tifatul Sembiring dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai pjs Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16 - 20 Juni 2010 di

Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015 (PKS, Sejarah Ringkas, 2011).

2. Deskripsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Partai Keadilan Sejahtera adalah partai Islam yang masih eksis di Indonesia khususnya di Kabupaten OKU Timur saat ini. perkembangan Partai Keadilan Sejahtera secara umum merupakan partai lanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang lahir pada Era Reformasi tahun 1998. Pada tanggal 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelesaikan seluruh proses verifikasi departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk dewan dan para kadernya. Partai ini adalah salah satu partai yang menggunakan asas Islam sebagai asas partainya dan partai yang menyatakan dirinya Partai Dakwah serta dikenal juga sebagai partai kader yang mempunyai militansi dan loyalitas kader yang kuat (PKS, Sejarah Ringkas, 2011).

Untuk pengurus PKS di tingkat daerah Kabupaten/kota disebut DPD (Dewan Pengurus Daerah). Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan. Terbentuknya Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten OKU Timur yaitu sebagai wadah untuk menampung aspirasi

umat Islam khususnya seluruh masyarakat di Kabupaten OKU Timur. Adapun Ketua Umum DPD PKS Kabupaten OKU Timur saat ini adalah Supriyono (wawancara dengan Bapak Ikhwanudin, tanggal 26 April 2022).

1) Struktur Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD OKU Timur

Struktur kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten OKU Timur, tersusun sebagai berikut:

- a. Supriyono (Ketua Umum)
- b. Ikhwanudin (Sekretaris Umum)
- c. Baharudin (Bendahara Umum)

Berdasarkan data yang di peroleh dari kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten OKU Timur, jumlah kader PKS OKU Timur kurang lebih 370 kader. Jumlah seluruh Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada periode 2020-2025 yang terdiri dari Ketua DPD, Sekretaris DPD, Bendahara DPD, dan terbagi menjadi 9 bidang yaitu bidang kaderisasi, bidang Perempuan dan Ketahanan keluarga, bidang kepemudaan dan kependuan, bidang pemenangan pemilu dan pilkada, bidang hubungan masyarakat, bidang hukum, kebijakan publik dan ketenagakerjaan, bidang pembangunan keumatan dan dakwah, bidang

pembinaan desa, tani dan nelayan, bidang pembinaan cabang (SK DPD PKS OKU Timur).

2) Kegiatan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) OKU Timur

Partai Keadilan Sejahtera memiliki kegiatan pengajian mingguan rutin yang wajib di ikuti oleh seluruh kader PKS, walaupun disaat pandemi kemarin PKS tetap melaksanakan kegiatan pengajian mingguan tersebut secara online. Sebelum pandemi ada beberapa kegiatan yang di lakukan oleh DPD PKS OKU Timur saat bulan ramadhan yaitu karnaval, pawai ramadhan, iftar jama'i, berbagi takjil dijalan, flashmop, bakti sosial dan pasar murah. Di waktu pandemi kemarin kegiatan PKS sifatnya tertutup, hanya fokus ke kader simpatisan dan ada bantuan covid juga untuk kader simpatisan (wawancara dengan bapak Shokheh, tanggal 27 April 2022)

3) Sekretariat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD OKU Timur

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berlokasi di Jalan Lintas Sumatera No. 079 RT 01 RW 04, Kelurahan Terukis Rahayu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Martapura, Sumatera Selatan.

3. Organisasi Sayap (*underbow*) PKS

Sama halnya seperti partai politik lainnya, PKS juga mempunyai organisasi sayap (*underbow*) seperti gerda keadilan, Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAPMI), Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS),

Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia Pasifik (YPPAP), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Namun secara nasional organisasi sayap (*underbow*) kepemudaan PKS hanya ada tiga yaitu Germa Keadilan, Garuda Keadilan dan PKS Muda. Berbagai lembaga-lembaga sosial tersebut berperan besar dalam pembinaan kader serta sebagai media mendekati diri dengan konstituen. Lembaga-lembaga ini juga memainkan fungsi sebagai mesin politik partai yang signifikan (wawancara dengan Bapak Ikhwanudin, tanggal 26 April 2022).

4. Visi dan Misi Keadilan Sejahtera

Setelah berganti nama dari Partai Keadilam (PK) menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka visi dan misi-nya pun mengalami perubahan redaksi sesuai dengan dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi tidak merubah maknanya. Dan dengan visi dan misi baru ini nampaknya PKS lebih bersifat nasionalisme dan akomodatif terhadap kebutuhan bangsa Indonesia secara universal. Di dalam AD/ART PKS memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi Partai adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Misi Partai adalah menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (AD/ART PKS, 2021).

5. Struktur Organisasi Partai Keadilan Sejahtera Skala Nasional

Sejak awal pendirian Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 20 April 2002, partai ini telah berhasil melakukan pengembangan struktural partai secara vertikal dengan terbentuknya jaringan sebanyak 30 DPW, 366 DPD, dan 2475 DPC. Dalam Anggaran Dasar partai BAB IV Pasal 8 tentang Struktur Organisasi di tingkat nasional pusat struktur organisasi Partai Keadilan Sejahtera PK- Sejahtera adalah sebagai berikut:

- a) Majelis Syura
- b) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat
- c) Majelis Pertimbangan Pusat
- d) Dewan Pengurus Pusat
- e) Dewan Syari'ah Pusat

Struktur pelaksana harian diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat DPP dengan skup nasional sampai tingkat kelurahan, yang meliputi:

- a) DPP (Pengurus harian setingkat nasional)
- b) DPW (Pengurus harian setingkat propinsi)
- c) DPD (Pengurus harian setingkat kotamadya atau kabupaten)
- d) DPC (Pengurus harian setingkat kecamatan)
- e) DPRa (Pengurus harian setingkat kelurahan) (AD/ART PKS, 2021).

6. Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Dalam Anggaran Dasar BAB III Pasal 9 mengenai Keanggotaan disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota

partai. Sedangkan dalam Anggaran Rumah Tangga BAB III Pasal 5 mengenai Sistem dan Prosedur Keanggotaan disebutkan bahwa anggota Partai Keadilan Sejahtera PK-Sejahtera terdiri dari:

- 1) Anggota Kader Pendukung, yaitu mereka yang terlibat aktif mendukung setiap kegiatan kepartaian. Anggota Kader Pendukung terdiri dari anggota pemula dan anggota muda.
- 2) Anggota Kader Inti, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan kepartaian dan dinyatakan lulus oleh panitia penyeleksian. Anggota Kader Inti terdiri dari anggota madya, anggota dewasa, anggota ahli, dan anggota purna.
- 3) Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (AD/ART PKS, 2021).

Jenjang keanggotaan kader ini merupakan jenjang kaderisasi para anggota Partai Keadilan Sejahtera. Jika telah memenuhi kualitas dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka jenjang keanggotaannya pun dapat ditingkatkan. Jenis-jenis pelatihan kepartaian, sebagai sarana pengkaderan partai di Partai Keadilan Sejahtera (Imdadun Rahmat, 2008, p. 274):

Training Orientasi Partai (TOP) 1 yaitu para calon anggota partai diberikan pemahaman awal mengenai struktur kepartaian, sejarah serta eksistensi sepanjang perjalanan PKS. Dalam tahap selanjutnya, seorang yang telah lulus dalam TOP 1 ini akan dibina dalam forum yang lebih

intim lagi, yakni melalui Taklim Rutin Partai (TRP) yang formatnya merupakan pengajian rutin, serta pendalaman materi-materi keIslaman yang kelak dipimpin oleh seorang murabbi.

Training Orientasi Partai (TOP) 2 yaitu seorang anggota pemula terdaftar yang telah cukup mumpuni dan layak bagi murabbi akan direkomendasikan untuk mengikuti jenjang pengkaderan selanjutnya. Peserta yang telah melalui jenjang pengkaderan TOP 2 ini berhak menyandang status sebagai anggota pemula terbina yang memiliki kewajiban untuk mengikuti beberapa serangkaian kegiatan tambahan partai, yakni Taklim Rutin Kader (TRK), Pelatihan-Pelatihan Kepartaian (PPK), serta Kegiatan Internal Partai (KIA).

Training Dasar (TD) 1, dan TD 2. Prasyarat untuk dapat menjalankan TD 1, seorang anggota pemula harus telah mendapatkan sebuah keterangan berupa Surat Kelulusan Anggota Pemula/Kartu Tanda Anggota Pemula (SKAP/KTAP). Bagi anggota pemula yang dinyatakan lulus dalam TD 1, maka statusnya berubah menjadi seorang anggota muda. Kegiatan anggota muda lainnya, selain TRK, PPK, dan KIA, yakni mengikuti Kajian Ilmu Sosial Politik 1 (KISP 1).

Setelah dinyatakan cukup kompeten oleh murabbi untuk menjalani jenjang pengkaderan berikutnya, yakni TD 2. Maka seorang anggota muda akan kembali direkomendasikan sang murabbi untuk menjalani TD 2. Lulusan dari TD 2 ini akan menyandang predikat anggota madya.

Training Lanjutan (TL) 1 yaitu seorang anggota madya yang telah lulus dalam TL 1 berhak mendapatkan status baru, yakni sebagai anggota dewasa. Setelah dinyatakan lulus dan menyandang gelar anggota dewasa, maka alur pengkaderan selanjutnya yakni menjalani Training Lanjutan (TL) 2. Seorang yang tengah, dan telah dinyatakan lulus dari TL 2 ini akan memperoleh gelar sebagai anggota ahli.

Selanjutnya alur pengkaderan tertinggi di PKS, adalah Training Manajemen dan Kepemimpinan Sosial (TMKS). TMKS dapat diikuti oleh seorang anggota ahli yang hendak menaikkan jenjang keanggotaannya di PKS menjadi seorang anggota purna. Selain anggota purna yang merupakan jenjang pengkaderan tertinggi di PKS, ada juga status anggota kehormatan yang dapat diperoleh tanpa melalui proses kaderisasi. Anggota kehormatan ini dapat disematkan oleh pengurus partai kepada seorang kader yang dirasa telah memiliki sumbangsih besar, serta figur ketokohnya yang dianggap dapat dijadikan panutan dalam tubuh internal partai.

7. Lambang Partai Keadilan Sejahtera

Makna yang terkandung dari lambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1***Lambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS)***

- a. Bentuk bulat yang ada dalam lambang PKS menggambarkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan dan kesatuan arah demi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat di bumi Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
- b. Bulan sabit melambangkan dimensi waktu, keserasian, keindahan, pencerahan, keluhuran Islam untuk menjaga keseimbangan, kesinambungan sejarah, kejayaan dan kelangsungan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Untaian 17 butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan adil, ukhuwah, istiqamah, berani, disiplin dalam menjalankan tugas, serta tegas dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
- d. Warna orange adalah warna baru yang melambangkan kehangatan, harapan, semangat kehidupan yang selalu optimistis dan semangat muda.
- e. Warna putih melambangkan bersih, suci, tulus, ikhlas dan mulia.

- f. Warna hitam melambangkan kemauan keras, disiplin, kekuatan, ketegasan, berwibawa, kepastian, aspiratif dan perlindungan (AD/ART PKS, 2021).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian berupa data-data yang ditemukan secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi dari dokumen atau catatan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022 sampai dengan 15 Mei 2022 dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dengan memakai data-data yang relevan dan real tanpa adanya pemalsuan data yang didapatkan dari narasumber yang terdiri dari pengarus DPD PKS OKU Timur dan beberapa kader DPD PKS OKU Timur. Hasil analisis data-data inilah yang nantinya diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta dapat menarik kesimpulan dari hasil analisis yang diperoleh.

A. Pola Rekrutmen Politisi Muda DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten OKU Timur

Peran pemuda dalam internal partai menjadi hal yang penting serta menjadikan kekuatan dalam internal partai. Modal yang dipunyai pemuda seperti loyalitas, pemikiran, dan relasi serta kemampuannya dalam sosial membuat PKS tertarik untuk memberikan tempat lebih kepada anak muda untuk meregenerasi partainya.

Dalam partai politik terdapat beberapa fungsi penting yang dijalankan partai sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan mereka.

Salah satu fungsi partai politik yang terkait dengan ini adalah rekrutmen partai politik. Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya .

Menurut Rush dan Althof rekrutmen politik dibagi menjadi dua cara. Pertama rekrutmen terbuka, yakni dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Kedua, Rekrutmen tertutup, berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum (Michael Rush, 2007, p. 247)

Menurut UU No 2 Tahun 2011 Pasal 29 tentang Partai Politik, Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a. Anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. (1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan. (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan. (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam melakukan rekrutmen anggota baru PKS menggunakan dua cara, yakni pola rekrutmen individual (fardhiyyah) dan pola rekrutmen institusional (jama'i). pola rekrutmen individual berbentuk pendekatan orang perorangan, seperti komunikasi personal secara langsung.

Bapak Ikhwanudin, salah satu pengurus DPD PKS OKU Timur yang menjabat sebagai sekretaris umum di DPD PKS OKU Timur, memberikan penjelasan tentang pola rekrutmen calon anggota partai di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten OKU Timur. Berikut ini kutipan wawancara peneliti dengan Bapak Ikhwanudin terkait dengan pola rekrutmen calon anggota partai yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS):

”kalau di PKS OKU Timur sendiri pola rekrutmen secara terstruktur menggunakan istilah fardhiyyah (pendekatan personal) dilihat dari ketokohnya dan kepopulerannya, disamping itu juga DPD PKS menggaet orang-orang yang berpotensi dari DPC. Di PKS pola rekrutmennya terbuka dimana PKS melakukan banyak cara untuk merekrut calon kader partai, diantaranya adalah pengincaran calon kader oleh masing-masing divisi. PKS OKU Timur juga mempunyai program yang dilakukan secara nasional yaitu Sekolah Cinta Indonesia (SCI), pada tanggal 8 Maret 2020 DPD PKS OKU Timur mengadakan program SCI tersebut di KPN Tumbuh Tegal Rejo. Dan pada tanggal 19 Desember 2021 PKS OKU Timur juga mengadakan acara Seminar Pra-nikah yang merupakan bagian dari strategi rekrutmen. Strategi nya kita mengadakan seminar dan ditawarkan mau tidak jadi anggota. Pola rekrutmen nya ada beberapa cara, pertama melalui kegiatan dan kedua secara personal.” (Wawancara, Ikhwanudin, tanggal 26 April 2022).

Dari wawancara tersebut jelas sekretaris umum DPD PKS OKU Timur mengatakan bahwa pendekatan secara pribadi masih tetap dilakukan sebagai upaya rekrutmen partai PKS di OKU Timur. Rekrutmen fardhiyyah sendiri dilakukan oleh anggota Divisi Kaderisasi, Divisi Kepemudaan dan Divisi Perempuan PKS terhadap beberapa orang. Dan rekrutmen jama'i yakni rekrutmen yang dilakukan secara kolektif dengan formal dan informal atau sering kita sebut perekrutan langsung ke partai seperti partai partai lainnya. Dari kedua cara rekrutmen ini, bisa di simpulkan bahwa PKS adalah partai terbuka. Terbukti PKS tidak merekrut anggota tidak hanya dari sistem fardhiyyah tapi lewat sistem jama'i.

Rekrutmen fardhiyyah (individual) adalah rekrutmen yang dilakukan oleh anggota Partai yang telah lama berkecimpung dalam partai tersebut terhadap satu atau dua orang dengan pendekatan pribadi atas inisiatif sendiri atau atas rekomendasi seorang mentor. Rekrutmen ini dilakukan dengan cara seseorang anggota partai senior mencari calon anggota partai, dimana calon tersebut kemudian dikondisikan melalui beberapa tahap, yaitu: ta'aruf (pengenalan dan pendekatan), ikhtiar (upaya mempengaruhi si calon), dan taqarrub (mendekatkan atau menghubungkan si calon dengan lingkungan partai). Hasil dari upaya pemantauan ini kemudian dilaporkan, dibicarakan, dan dianalisis dalam forum berdasarkan standar syarat syarat calon anggota partai. Jika memenuhi syarat maka ia akan diarahkan untuk mengikuti Training Kader Kepartaian.

Sedangkan rekrutmen jama'i (institusional) yakni rekrutmen yang dilakukan secara kolektif dengan cara formal dan informal. Rekrutmen jenis ini memiliki beberapa pola seperti, Rekrutmen kepartaian, yakni rekrutmen terhadap anggota masyarakat melalui kegiatan formal kepartaian untuk menjadi anggota dan simpatisan partai. Rekrutmen melalui pendaftaran peserta, Pendaftaran peserta ini bisa dilakukan di sekretariat tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, hingga rumah rumah kader PKS atau melalui website. Rekrutmen juga bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan yang lain, seperti Seminar, Majelis Ta'lim, Studi Intensif, Kegiatan Ramadhan, Pelatihan, Baksos, Santunan, dan Kegiatan-Kegiatan yang lain. Semua jenis rekrutmen ini berorientasi menjadi pintu masuk bagi calon kader untuk menjadi kader Partai PKS OKU Timur. (Neni Nuraeni, Ade Djuhana, 2019).

Sebagai temuan peneliti dilapangan terkait rekrutmen DPD PKS OKU Timur dengan pola rekrutmen jama;i (institusioanl) ialah dengan menggerakkan DPRa (Dewan Pimpinan Ranting), seperti yang diungkapkan oleh sekretaris umum DPD PKS OKU Timur:

“... dari struktur PKS ada DPD,DPC, dan DPRa. Di OKU Timur terdapat 20 DPC namun ada beberapa yang sementara belum aktif. Melalui struktur DPRa dan DPC boleh bergabung, memang masing-masing DPRa dan DPC itu mengajukan dan mencari tokoh-tokoh masyarakat yang beerpotensi dan siap untuk di TOP kan atau training untuk di kasih materi-materi tentang bagaimana berorganisasi, berbagai hal tentang PKS dan yang lainnya”. (Wawancara, Ikhwanudin, tanggal 26 April 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa DPRa dan DPC merupakan struktur formal PKS ditekankan untuk aktif dalam menjaring tokoh-tokoh masyarakat yang bisa dan bersedia untuk selanjutnya melalui tahapan TOP (training orientasi partai).

Didalam AD/ART PKS proses rekrutmen kader DPD PKS OKU Timur tidak memiliki kriteria khusus, hanya saja DPD PKS OKU Timur menginginkan orang yang bergabung dengan partai PKS ini bisa memberikan kontribusi untuk partai dan tidak harus memiliki pendidikan yang tinggi karena di suatu partai itu tugas nya merekrut dan membina. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Ikhwanudin dalam wawancara dengan peneliti, yaitu:

“untuk masuk menjadi kader PKS OKU Timur itu bebas, yang penting merupakan warga negara indonesia. Bahkan tidak sekolah juga bisa menjadi kader PKS OKU Timur, karena kita tugasnya merekrut dan membina. Sesuai dengan motto kita yaitu untuk membangun negara dimulai dari membangun pribadi, kemudian membangun keluarga, membangun komunitas, membangun desa, membangun daerah, membangun provinsi, dan membangun negara. Artinya kita memulai dari hal yang paling kecil yaitu kepribadian, jadi disini kita akan membina suatu kepribadian yang baik. (Wawancara, Ikhwanudin, tanggal 26 April 2022).

Melalui kutipan-kutipan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa PKS selalu mengutamakan kaderisasi, bukan hanya mengandalkan tokoh-tokoh. Sehingga berjalannya kaderisasi partai pada PKS menjadi hal yang dianggap penting dan mutlak karena harus dilakukan untuk keberlanjutan partai. Terdapat berbagai macam jenis kegiatan yang dimiliki oleh PKS sebagai bentuk kaderisasinya. Terdapat berbagai tingkatan juga untuk level

kaderisasi yang dimiliki oleh PKS. Hal tersebutlah yang membuat PKS menjadi berbeda dengan partai lainnya. Terkait bagaimana proses kaderisasi yang ada di DPD PKS OKU Timur, bapak Sariyono menyatakan sebagai berikut:

“...Di PKS ini ada istilah TOP 1, TOP 2. Nanti kalau sudah TOP lanjut ke TRP yaitu Taklim Rutin Partai. Jadi proses bagaimana memahami situasi organisasi, seperti visi dan misinya jangan sampai dia bergabung di PKS tapi tidak tau arahnya mau kemana”. (wawancara, Sariyono, tanggal 1 Mei 2022).

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa kader harus menjalani TOP (Training orientasi Partai) 1 dahulu, kemudian dilanjutkan dengan TOP 2. Dan setelah menyelesaikan proses training orientasi partai (TOP) tersebut, selanjutnya akan memasuki taklim rutin partai (TRP). Hal tersebut dilakukan agar kader memahami situasi organisasi maupun visi dan misi organisasi partai PKS.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah mengincar anak-anak muda berbakat yang tertarik dibidang politik. Hal tersebut disampaikan Bapak Ikhwanudin salah satu pengurus PKS OKU Timur sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Umum di DPD PKS OKU Timur dalam wawancaranya bersama penulis. Pak Ikhwanudin mengatakan, PKS OKU Timur akan mengeluarkan program baru untuk membina anak-anak muda yang tertarik dibidang politik. Nantinya, mereka akan diarahkan oleh partai yang diketuai oleh Supriyono tersebut, apakah mereka akan berada di jalur eksekutif atau legislatif.

PKS OKU Timur melakukan rekrutmen kaderisasi dengan berafiliasi melalui organisasi kemasyarakatan tertentu. Kegiatan pengenalan partai dimulai dengan pemberian pengajian-pengajian, dan proses ini termasuk pola rekrutmen jama'i (institusional) yang dilakukan oleh PKS. Hal ini terlihat saat wawancara bersama Bapak Ikhwanudin selaku Sekretaris Umum di DPD PKS OKU Timur mengatakan bahwa:

“...Banyak juga kader PKS OKU Timur yang berusia 20-25 tahun, karena PKS OKU Timur bekerja sama dengan organisasi mahasiswa seperti KAMMI, KNPI dan HMI. Jadi dari situlah PKS OKU Timur merekrut para kader muda yang mempunyai potensi...” (Wawancara, Ikhwanudin, tanggal 26 April 2022).

Penglibatan kader-kader muda ini dilakukan karena bentuk partisipasi politik generasi muda dewasa ini cenderung menunjukkan perubahan dibandingkan dengan generasi pendahulunya. Jika pada masa lalu bentuk partisipasi politik lebih bersifat konvensional dan cenderung membutuhkan waktu lama, misalnya aksi turun ke jalan melakukan demonstrasi atau boikot, tindakan politik (political actions) generasi muda dewasa ini dipandang sebagai sesuatu yang "baru" karena tidak pernah terjadi pada masa satu dekade lalu. Contohnya adalah partisipasi politik melalui internet dan media sosial. Tindakan politik generasi muda masa kini memiliki sifat cenderung lebih individual, bersifat spontan (ad-hoc), berdasarkan isu tertentu dan kurang terkait dengan perbedaan sosial. Hal ini terjadi akibat pengaruh globalisasi dan individualism.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Shokheh selaku kader DPD PKS OKU Timur yang masuk menjadi kader PKS OKU Timur melalui salah satu organisasi, beliau menyatakan sebagai berikut:

“awal mula bergabung di PKS OKU Timur, saat saya masih menjadi mahasiswa sudah ada pembinaan di kampus dan ikut mentoring. Saya kuliah sambil pesantren, dan saat saya di pesantren ikut ngaji diajak untuk bergabung. Dulu waktu di kampus saya memang tidak di politik tapi ikut kumpul-kumpul di mushola, di BEM, dan organisasi KAMMI. Dari situlah saat pasca kampus saya bergabung di PKS pada tahun 2006 dan jadi kader di PKS.” (wawancara, Sokheh, tanggal 27 April 2022).

Selain pernyataan dari bapak Sokheh tersebut, ada juga bapak Sariyono selaku kader DPD PKS OKU Timur yang masuk menjadi kader PKS melalui organisasi juga menyatakan bahwa:

“saya menjadi kader PKS diawali ketika interaksi di mahasiswa, jadi saat kuliah saya sudah ikut organisasi dan banyak teman saya yang bergabung di organisasi KAMMI sedangkan saya dulu di organisasi HMI. Tapi interaksi kita banyak dengan teman-teman KAMMI dan hampir kebanyakan oerorganisasi KAMMI itu bergabung ke PKS, jadi karena sering interaksi dengan KAMMI maka ikut interaksi juga dengan PKS. Nah dari situla saya bergabung di PKS dan menjadi kader sampai sekarang.” (wawancara, Sariyono, tanggal 1 Mei 2022).

Pernyataan tersebut memperkuat bahwa dalam melakukan rekrutmen kader, PKS memang menggunakan pola rekrutmen jama'i (institusional). Artinya DPD PKS OKU Timur benar-benar menggunakan atau melibatkan struktur formal PKS maupun organisasi-organisasi sayap yang berafiliasi dengan PKS dan bekerjasama dengan institusi-institusi keagamaan seperti masjid maupun institusi pendidikan seperti sekolah, pesantren dan universitas.

Tak hanya offline, proses pendaftaran anggota juga bisa dilakukan melalui online. Hal itu diungkapkan oleh Bapak Nur Sidik Meilani salah satu anggota PKS Muda saat wawancara bersama penulis:

“kalau mau bergabung di PKS OKU Timur lewat media sosial juga bisa, pakai google form dan di share ke semua media sosial. Ada juga yang resmi, misalnya moment saat pemilihan nanti ada yang ingin mencalonkan diri dan sebelumnya bukan anggota PKS nah itu nanti bisa kita rekrut juga.” (wawancara, Nur Sidik, tanggal 27 April 2022)

Untuk merealisasikan hal itu, PKS OKU Timur menyediakan perangkatnya melalui Website Resmi PKS OKU Timur sehingga siapapun anak bangsa yang ingin bergabung dan menyalurkan hak politiknya melalui Partai Keadilan Sejahtera dipersilakan untuk mendaftarkan diri. Pada prinsipnya, PKS OKU Timur tidak membatasi siapa pun yang ingin bergabung dan menjadi bagian dari partai.

Metode seperti ini dilakukan setiap tahun karena untuk regenerasi, menambah anggota baru dan mengikuti kebijakan yang ada. Semakin banyak kader yang baik maka semakin bagus nilai partai tersebut.

Dari semua kutipan wawancara yang peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan saat PKS OKU Timur melakukan rekrutmen terhadap para pemuda dan tokoh-tokoh atau yang berusia 40 tahun keatas. Hanya saja terdapat dua macam pola rekrutmen, untuk merekrut pemuda atau mahasiswa dilakukan dengan cara penjangingan secara umum dan itu termasuk kedalam pola rekrutmen secara jama'i (institusional) melalui organisasi sayap PKS seperti KAMMI. Sedangkan

untuk rekrutmen para tokoh dilakukan secara personal seperti dengan cara silaturahmi dan itu termasuk kedalam pola rekrutmen secara fardhiyyah (individual).

B. Strategi Yang Dilakukan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) OKU Timur dalam rekrutmen pemuda

Anak muda menjadi fokus rekrutmen yang dilakukan oleh PKS untuk menjadi kader partai agar terciptanya regenerasi di tubuh partai. Terdapat alasan kenapa PKS menginginkan anak muda untuk menggerakkan partai ini seperti yang dikemukakan oleh Sekretaris umum DPD PKS OKU Timur bapak Ikhwanudin:

“ kalau sekarang rata-rata usia kader PKS OKU Timur paling banyak itu 30-40 tahun. Kalau untuk caleg sekarang belum full 100% karena masih dalam rangka rekrutmen dan masih penjangkaran caleg. PKS mempunyai target untuk 30% caleg muda, karena dari DPP PKS sendiri mencanangkan caleg mudanya 30%. Tapi saat ini masih berat untuk mencari caleg muda. Karena keberanian mereka untuk mencalonkan diri itu tidak banyak, mungkin karena faktor pengalaman, dukungan keluarga dan dukungan dana. Sekarang PKS OKU Timur sudah ada 2 nama caleg muda yang berasal dari Martapura, dan alhamdulillah juga di OKU Timur ada pak Rafelta Tuska Putra, S.Pt yang berusia 30 tahunan berhasil mendapat kursi di DPRD OKU Timur.” (Wawancara, Ikhwanudin, tanggal 26 April 2022).

Fokus yang dilakukan oleh DPD dan DPC PKS adalah memikirkan bagaimana strategi yang efektif dapat dilakukan agar menarik para anak-anak muda untuk bergabung dengan partai. Yaitu dengan memadukan Keislaman dan perekonomian seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sokheh:

“kalau untuk yang muda-muda ini memang butuh strategi yang khusus, yaitu dengan cara memadukan antara spirit keislaman dan perekonomian melalui bentuk kegiatan-kegiatan seperti seminar

pranikah yang gunanya untuk memberi pengajaran tentang pernikahan yang baik dalam islam, ada juga kegiatan sekolah muda tani, sekolah bisnis dan pasar anak muda” (wawancara, Sokheh, tanggal 27 April 2022).

PKS menggunakan dua strategi rekrutmen, *Pertama* rekrutmen individual pendekatan secara personal. Contohnya seperti membentuk kelompok kecil untuk mengaji (liqo) atau sekarang yang disebut unit pembinaan dan pengkaderan anggota (UPPA). Liqo atau UPPA adalah semacam pengajian yang di ikuti oleh beberapa orang yang dilaksanakan sekali dalam seminggu. Dalam kegiatan liqo/UPPA ini diisi dengan majelis dzikir dan majelis ilmu yang membahas tentang keimanan, tauhid, ibadah, amalan sunnah. Dalam satu majelis liqo/UPPA dipimpin oleh satu murabbi yang lebih senior, para kader dilatih menjadi da'i, berdakwah, tabligh akbar, dan majelis zikir. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak sariyono selaku salah satu kader PKS OKU Timur saat wawancara bersama penulis:

“Di PKS ini ada istilah unit pembinaan pengkaderan anggota atau UPPA. UPPA merupakan salah satu bentuk pola rekrutmen politik yang sudah sedari dulu dijalankan oleh PKS. Pola ini sangat efektif dijalankan karena banyak masyarakat khususnya para pemuda yang saat ini sudah dekat dengan masjid, banyak pemuda yang memutuskan untuk hijrah sehingga kami mudah untuk menjangkau nya. Pola kegiatannya ialah dengan cara mengikuti kajian keislaman dan pengajian rutin.” (wawancara, Sariyono, tanggal 1 Mei 2022).

Kedua, rekrutmen organisasi. PKS berafiliasi dengan berbagai organisasi sayap partai yang berstatus formal atau informal, sehingga partai dapat memanfaatkan kelompok ini untuk meraup kader anak muda

yang potensial. Organisasi sayap partai dapat berupa organisasi pemuda, organisasi pendidikan, olahraga maupun organisasi lainnya. Organisasi inilah yang dapat menjadikan sumber daya yang harus dibina partai politik.

Dalam sebuah organisasi sayap atau *underbow* partai, dapat dikembangkan dan diberdayakan oleh partai politik sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan dari masyarakat yang pada gilirannya mampu memenangkan partai dalam suatu kompetisi politik (Panjaitan, 2019)

Organisasi sayap partai yang biasanya menjalankan fungsinya sebagai penghubung partai dalam merekrut kader-kader muda baru PKS dan menjalankan setiap aktivitas partai yang berhubungan dengan kepemudaan ialah Garuda Keadilan. Sebenarnya dalam partai sendiri ada organisasi resmi bernama “PKS Muda” akan tetapi tidak berjalan dengan efektif, untuk itu Garuda keadilan mengambil alih posisi itu.

Garuda Keadilan merupakan sekelompok kecil yang berasal dari anak-anak kader PKS yang biasanya diisi anak muda sekitar 17-25 tahun. Yang kegiatannya membantu mensukseskan acara resmi partai mulai dari tingkat DPC hingga DPD. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Nur Sidik, anggota PKS muda OKU Timur:

“di PKS ini terdapat juga istilah Garuda Keadilan, Garuda Keadilan adalah salah satu sayap muda PKS yang sebagian besarnya merupakan putra-putri kader PKS. Anak-anak kader PKS yang sudah besar-besar baik siswa maupun mahasiswa, yang keanggotaanya dimulai dari tingkat paling bawah yaitu DPRa

hingga DPP Pusat. Karena besar dilingkungan PKS, maka minat terhadap partai ini tinggi. Kegiatan utama yang dilakukan Garuda Keadilan ialah mensukseskan setiap segala acara resmi yang dilakukan partai, baik dalam kegiatan keagamaan, budaya, sosial maupun kesehatan. Kalau untuk di OKU Timur ini anggota Garuda Keadilan masih sedikit dan belum efektif, karena rata-rata anak dari kader masih kecil-kecil” (wawancara, Nur Sidik, tanggal 27 April 2022)

Dengan memaksimalkan peran organisasi sayap partai politik, sebagai salah satu pilar utama kaderisasi, dan penguatan kader, maka proses seleksi kader untuk duduk sebagai legislatif maupun eksekutif akan lebih mengedepankan kualitas intelektual, integritas, serta basis massa pendukung. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh DPD PKS OKU Timur dalam menentukan kader-kader yang diajukan dalam pemilihan calon legislatif. Selain kualitas intelektual dan basis massa, popularitas juga menjadi acuan utama seperti yang dikemukakan oleh Sokheh:

“Syarat utama itu popularitas, dia di kenal di lingkungannya bagaimana mau dipilih kalo dia tidak dikenal. Biasanya aktivis-aktivis yang mereka sudah aktif di masjid nya, di organisasinya. Dan tidak hanya itu juga, seseorang juga harus mempunyai integritas yaitu meliputi kejujuran, loyalitas dan bertanggung jawab” (wawancara, Sokheh, tanggal 27 April 2022).

Pengaruh yang dimiliki kader terhadap eksistensi partai politik sangat penting. Kader yang akan dikenal dan diterima oleh masyarakat menjadi kunci dari eksistensi partai politik. Eksistensi dari partai politik juga dipengaruhi dari hadirnya kader-kader yang berkualitas di sekeliling masyarakat hingga membuat masyarakat memiliki calon pemimpin yang dibutuhkan, tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat masih menilai tentang kepribadian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dilakukan dengan dua cara, yaitu rekrutmen fardhiyyah dan jama'i. rekrutmen fardhiyyah dilakukan oleh kader PKS terhadap beberapa orang. Dan rekrutmen jama'i yakni rekrutmen yang dilakukan secara kolektif dengan formal dan informal. Dari kedua cara rekrutmen ini dapat disimpulkan bahwa PKS adalah partai terbuka. Dalam rangka mencari calon anggota yang siap melanjutkan perjuangan partai, PKS melalui bidang kaderisasi nya membuat beberapa program rekrutmen calon anggota partai politik. Kemudian program tersebut diimplementasikan dalam bentuk kegiatan menarik, pendaftaran secara online, dan pendaftaran secara konstituen.
2. Strategi yang dilakukan oleh DPD PKS OKU Timur dalam melakukan rekrutmen terhadap anak muda untuk menjadi kader ialah dengan cara mengkombinasikan antara nilai-nilai keislaman, perekonomian dan sosial di masyarakat. Hal ini dikarenakan agar anak muda tertarik dan tidak berpikir bahwa PKS ini tidak selalu tentang politik. Untuk mewujudkan cara tersebut yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan bisnis, memberikan mentor-mentor keislaman

dengan membentuk kelompok pengajian, serta memberikan mentor bisnis.

B. Saran

Dengan adanya penelitian skripsi ini, penulis memiliki beberapa saran.

1. Bahwasannya rekrutmen politik memiliki hal yang fundamental dalam melakukan regenerasi politik. Untuk itu partai perlu berbenah secara serius dalam melakukan rekrutmen terhadap para anak muda, karena masa depan partai politik dipegang anak muda hari ini.
2. Perlu dilakukannya kaderisasi pada internal partai politik yang berkualitas dan berjenjang sehingga dapat memunculkan kader-kader partai yang berintegritas serta loyal kepada partai.
3. Anak muda perlu dipercayai menjabat pada internal partai agar anak-anak muda matang secara politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Althoff, P. Rush, M. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Alih bahasa oleh Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, M. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. (2009). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Efriza, (2021). *Pengantar Politik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Erawan, I Ketut. P, Riswanda, I. dkk. (2010). *Draft Modul Organisasi dan Manajemen Kepartaian: Bab 1 Manajemen sumberdaya Manusia Politik*.
- Firmanzah. (2011). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positionong Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Huntington, S. P. (2003). *Tertip Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Terj. Sahat Simamora dan Suryatim. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Imdadun Rahmat, M. (2008). *Ideologi Politik PKS : Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta
- Labolo, M. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Lay, C. (2006). *Involusi Politik Esai-Esai Transisi Indonesia*. Yogyakarta: Pascasarjana.
- Marleni, E. (2022). *Sejarah Budaya dan Keadaan Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan*. Lombok Tengan: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Ma'soed, M. (2011). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Michael Rush, P. A. (2007). *Pengantar Sosilogi Politik, Terj. Kartini Kartono*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nogi Tangkilisan, H. (2003) *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Sahid, K. (2011). *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Setiadi, Elly. M, Usman. K. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenadamedai Group.

Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo, anggota Ikapsi.

Syafiie, I. K. (2010). *Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Jurnal

Andani, M. (2019). Rekrutmen dan Kaderisasi Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum 2019 Oleh Partai Keadilan Sejahtera. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sriwijaya (UM-Tapsel)*, 4.

Azri, R. M. (2019). Rekrutmen dan Kaderisasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang. *Jurnal Ilmu Politik Universitas Andalas (JDPL FISIP)*, 2.

Kesuma, S. (2015). Rekrutmen Politik Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Pekanbaru Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Riau (JOM Fisip)*, 1.

Nuraini, N. A. D. (2019). Pola Rekrutmen dan Pembinaan Kader Partai Keadilan Sejahtera. *Varia Hukum*, 161.

Nuhdi, H. I. (2007). Sikap Politik DPW Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta Terhadap Keistimewaan Yogyakarta Tahun 2007. *UMY*, 22.

Panjaitan, M. J. (2019). Fungsi dan Hubungan Organisasi Sayap Partai Politik Dengan Partai Politik di Indonesia. *Sekolah Tinggi Hukum Bandung*, 8.

Risdiana, W. A. (2019). Determinasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010 dan 2015. *UIN Raden Fatah*, 32.

Undang-Undang dan AD/ART

Pemerintah Indonesia. 2011. *Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik*. Lembaran RI Tahun 2008 Nomor 2. Sekretaris Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2002. *Undang-Undang No.31 Tahun 2001 tentang Partai Politik*. Sekretaris Negara. Jakarta

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera. 2021. Sekretaris Jendral. Dewan Pengurus Pusat Partai Keadulan Sejahtera.

Web-Site

analisadaily. (2022, juli 15). Retrieved agustus 8, 2022 from <https://analisa.link>.

Dinata, D. (2021, Januari 18). Retrieved Maret 20, 2022. from <https://www.GlobalPlanet.News.com>

Habibi, A. (2016, November 02). Retrieved Januari 16, 2022. from <https://www.quireta.com>.

Kompas. (2022, maret 6). Retrieved juni 20, 2022 from <https://www.kompas.com>.

PEMALANG, P. (2015). *Sejarah PKS*. Retrieved from pemalang.pks.id.

PKS, D. (2011, May 31). Retrieved Maret 19, 2022, from pks.id.

PKS, D. (2011, May 31). *Sejarah Ringkas*. Retrieved Maret 20, 2022, from PKS.id.

Setyawan, H. (2020, November 26). Retrieved Januari 20, 2022. from <https://www.satunama.org>.

Sukoyo, Y. (2019, November 27). Retrieved Desember 20, 2021. From <https://www.beritasatu.com>.

www.okutimurkab.go.id.

kab-okutimur.kpu.go.id.

<https://pksmuda.id/>.

okutimurkab.go.id.

Zaenuri, M. (2016, Oktober 16). Retrieved Januari 23, 2021 from <https://news.detik.com>.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
NOMOR : B. 911 /Un.09/IV.3/PP.009/06/2022

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan:
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Kepala Prodi Ilmu Politik Islam **REGITA PRAMESTI PUTRI**, tanggal, 15 Oktober 2021
- MENGINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang,
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 UIN Raden Fatah Palembang;
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 UIN Raden Fatah Palembang;
 5. Pedoman Akademik UIN Raden Fatah Palembang No. LXXV tahun 2004;
 6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta IAIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

: Menunjuk Saudara :

	N A M A	NIP
PEMBIMBING I	Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum.	19720119 200701 1 011
PEMBIMBING II	Ryllian Chandra Eka Viana, M.A.	19860405 201903 1 011

Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora atas nama Saudara :

N a m a : Regita Pramesti Putri

N I M : 1810404017

Prodi : Politik Islam

Judul Skripsi :

"Pola Rekrutmen Politisi Muda di DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur"

Masa bimbingan : Tiga Bulan TMT. 08 Juni s/d 08 September 2022 (Perpanjangan)

- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 08 Juni 2022

D e k a n

Endang Rochmiatun

Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan;
3. Pembimbing Skripsi
4. Ka. Prodi Politik Islam
5. Arsip;



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Nomor : B-*524* /Un.09/IV.3/PP.009/04/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth.
Pengurus DPD
Partai Keadilan Sejahtera
Kab. OKU Timur
di Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian/observasi kepada mahasiswa kami sbb:

Nama : Regita Pramesti Putri
NIM : 1810404017
Prodi : S1 Politik Islam
Tempat : Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera Kab. OKU Timur
Judul Penelitian : **Pola Rekrutmen Politisi Muda di DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur**

Knowledge, Quality & Integrity

Untuk melakukan pengambilan data penelitian
Lama pengambilan data : 7 April – 7 Juli 2022

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 4 April 2022
Dekan,

Endang Rochmiatun

www.sumsel.pks.id



Nomor : 061 /AF-10-PKS/2022
Lampiran: -
Hal : Ijin Penelitian

Martapura, 11 Dzulqoidah 1443 H
11 Juni 2022 M

Kepada Yang Kami Hormati
Regita Pramesti Putri
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat kelak. Amma ba'du.

Dengan ini kami DPTD PKS OKU Timur Memberikan Ijin Penelitian Kepada Saudara Regita Pramerti Putri untuk mengadakan penelitian ke DPD PKS OKU Timur. Berhubungan dengan Pola Rekrutmen Politisi Muda di DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dewan Pengurus Daerah
Partai Keadilan Sejahtera
Kab. Ogan Komering Ulu Timur

Ust. Supriono
Ketua

NOTA DINAS

Perihal : Dalam mengikuti ujian Munaqosah jurusan politik Islam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora

UIN Raden Fatah Palembang

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul : “Pola Rekrutmen Politisi Muda di DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur”

Yang ditulis oleh :

Nama : Regita Pramesti Putri

NIM : 1810404017

Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 15 Agustus 2022

Pembimbing I


Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum
NIP. 197201192007011011

NOTA DINAS

Perihal : Dalam mengikuti ujian Munaqosah jurusan politik Islam

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul : “Pola Rekrutmen Politisi Muda di DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur”

Yang ditulis oleh :

Nama : Regita Pramesti Putri

NIM : 1810404017

Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang , Agustus 2022

Pembimbing II



Ryllian Chandra Eka Viana, MA

NIP. 198604052019031011



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADENFATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikri Km. 3,5 Palembang 30126Telp (0711) 353480 website:www.radenfatah.ac.id

HALAMAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Regita Pramesti Putri
NIM : 1810404017
Fakultas : Adab dan Humaniora
Jurusan : Politik Islam
Judul Skripsi : Pola Rekrutmen Politisi Muda di DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Kabupaten OKU Timur
Pembimbing I : Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum

No	Hari / Tanggal	Pembahasan	Saran	paraf
1.	05/2/22	Bob I	parafda pppm	T
2	17/2/22	Bob I	penulisan skripsi	T
3	27/2/22	Bob I	penulisan halaman pernyataan penomoran Buku perkhodanan PKS	T
4	30/2/22	Bob I	Tambahan buku pada kelebihan politik Buku HGT di print	T
5		Bob II	caran buku - yg relevan bantuan di skripsi	
6	20/7/22	Bob I-IV	A. Cohen ke p.ubun, M bunt Cele Kselubun	T



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADENFATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikri Km. 3,5 Palembang 30126Telp (0711) 353480 website:www.radenfatah.ac.id

HALAMAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Pembimbing I : Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum

No	Hari / Tanggal	Pembahasan	Saran	paraf
			<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara dengan Ayra' PKS - Wawancara Ketua/ Sekretaris DPC PKS 	P
	14/8/22	Bab 1-V All sudah lengkap		P



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADENFATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikri Km. 3,5 Palembang 30126Telp (0711) 353480 website:www.radenfatah.ac.id

HALAMAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Pembimbing II : Ryllian Chandra Eka Viana, MA

No	Hari / Tanggal	Pembahasan	Saran	paraf
6.	Jumat. ⁰³ / ₀₆ 2022	BAB IV dan V	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi yg dijabarkan oleh PKS harus dijelaskan. - Kurangi kutipan langsung - Narasikan kembali dengan analisa sendiri 	
7.	Selasa ¹⁴ / ₀₆ 2022	BAB IV dan V	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan pembahasan di BAB IV lebih detail - Kurangi BAB Gambaran Umum Okut di BAB 3r yg tidak membahas tentang politik - Tambahkan kondisi politik di Oku Timur di BAB 3 	
8.	Kamis ¹¹ / ₀₈ 2022	BAB 1- V	<ul style="list-style-type: none"> - Benarkan kutipan penulis - Tulis kutipan sumber 	
9.	Jumat ¹⁹ / ₀₈ 2022	Acc untuk diujikan pada sidang munaqosah		



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADENFATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikri Km. 3,5 Palembang 30126Telp (0711) 353480 website:www.radenfatah.ac.id

HALAMAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Regita Pramesti Putri
NIM : 1810404017
Fakultas : Adab dan Humaniora
Jurusan : Politik Islam
Judul Skripsi : Pola Rekrutmen Politisi Muda di DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Kabupaten OKU Timur
Pembimbing II : Ryllian Chandra Eka Viana, MA

No	Hari / Tanggal	Pembahasan	Saran	paraf
1.	Senin, 31/01/2022	BAB I	Perbaiki Draft	
2.	Senin, 14/02/2022	BAB I	- Kurangi latar Belakang - Tambahkan daftar calon tetap - Tambahkan perbedaan pola rekrutmen dengan partai lain	
3.	Senin, 07/03/2022	BAB I BAB II	- ACC BAB I - Tambahkan teori pola rekrutmen yg dilakukan PKS	
4.	Selasa, 15/03/2022	BAB II	ACC Lanjut ke BAB selanjutnya	
5.	Selasa, 22/03/2022	BAB III	ACC BAB III. Lanjut Penelitian lapangan	

Data Informan :

1. Nama : Ikhwanudin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Sekretaris DPD
2. Nama : Sokheh Amir
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Kader PKS
3. Nama : Nur Sidik Meilani
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu & Pilkada
(Mantan Anggota PKS Muda)
4. Nama : Sariyono
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Kader PKS



Wawancara bersama Bapak Ikhwanudin (Sekretaris DPD PKS OKU Timur)



Wawancara bersama Bapak Sariyono (Kader DPD PKS OKU Timur)



Wawancara bersama Bapak Sokheh Amir (Kader DPD PKS OKU Timur)





Wawancara bersama Bapak Nur Sidik Meilani (Kader DPD PKS OKU Timur)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Regita Pramesti Putri
NIM : 1810404017
Tempat, Tanggal Lahir : OKU Timur, 10 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
No. HP : 0857-6688-1233
E-mail : rpramestiputri@gmail.com
Riwayat Pendidikan : - TK Pertiwi Gumawang
- SD Negeri 07 Gumawang
- SMP LPB Belitang
- MAN 1 OKU Timur